



RENJA 2026

2026 RENCANA KERJA

"Peningkatan PDRB dan Penurunan
Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan Berbasis
Pengelolaan SDKP yang Berkeadilan dan Berkelanjutan."

Disusun Oleh:
Dinas Kelautan & Perikanan Prov.
Sulawesi Tengah



dkpprovsulteng@gmail.com

www.dkp.sultengprov.go.id





GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000-7.2/251/Bappada - 9.51/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubenrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

1. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;
38. Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Hidayah dan Rahmat-Nya, penulisan dan penyusunan "**Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026**" dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksana kegiatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Tahun 2026.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai Rencana dan Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya mensinergikan program pusat dan daerah dalam menyongsong visi dan misi pemerintah di Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran membangun sangat diperlukan sebagai modal dasar perbaikan dan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Palu, Desember 2024
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

ttd

MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600418 199203 1 009

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1

- 1.1 Latar Belakang..... 1
- 1.2 Landasan Hukum 2
- 1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
- 1.4 Sistematika Penyusunan..... 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD 5

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 5
 - 2.1.1 Analisa Capaian Kinerja 5
 - 2.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 9
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 14
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 16
 - 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng..... 16
 - 2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih 18
- 2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
dengan Renstra K/L..... 22
- 2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 24
 - 2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah 24
 - 2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 32
- 2.6 Penataan Isu- Isu Strategis 32
- 2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 39

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 39
 - 3.1.1 Sinergitas Dokumen-dokumen Perencanaan 39
 - 3.1.2 Rekomendasi Kebijakan berdasar Rancangan Teknokratik RPJMD 49
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 69
- 3.3 Program dan Kegiatan 69
- 3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2025 dan Rencana 2026..... 71
- 3.5 Fokus Utama Program Dan Kegiatan Tahun 2026 75
 - 3.5.1 Sekretariat..... 75
 - 3.5.2 Perikanan Tangkap 75
 - 3.5.3 Perikanan Budidaya dan P2HP..... 77

3.5.4 Pengelolaan Ruang Laut.....	78
3.5.5 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.....	78
3.5.6 UPTD Balai Perbenihan Perikanan	79
3.5.7 UPTD PMHP	80
3.5.8 UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi P3K	80

BAB IV

PENUTUP	82
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2024	5
Tabel 2.2 Capaian Nilai Tukar Perikanan Sulawesi Tengah 2024	6
Tabel 2.3 Kawasan Konservasi Perairan Sulawesi Tengah s.d. 2024	8
Tabel 2.4 Jumlah Persentase Keseluruhan Capaian Kinerja	9
Tabel 2.5 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022-2024	9
Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	17
Tabel 2.7 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas.....	20
Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Dinas berdasarkan Sasaran Renstra K/L	22
Tabel 2.9 Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K.....	27
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Dinas berdasarkan Analisa KLHS	32
Tabel 2.11 Identifikasi Isu-isu Strategi	33
Tabel 3.1 Sasaran Utama Visi RPJPN dan Sasaran Utama Visi RPJPD	55
Tabel 3.2 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Kota Palu.....	60
Tabel 3.3 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Sigi.....	61
Tabel 3.4 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Donggala	61
Tabel 3.5 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Buol	62
Tabel 3.6 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Tolitoli	63
Tabel 3.7 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Parigi Moutong	63
Tabel 3.8 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Poso	64
Tabel 3.9 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Morowali.....	65
Tabel 3.10 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Morowali Utara	65
Tabel 3.11 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Banggai	66
Tabel 3.12 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Banggai Kepulauan	67
Tabel 3.13 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Banggai Laut	67
Tabel 3.14 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wil Tojo Una-una.....	68
Tabel 3.15 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026.....	69
Tabel 3.16 Pendanaan Program dan Kegiatan 2025 dan Rencana 2026.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 NTNP Sulteng Tahun 2022-2024.....	10
Gambar 2.2 AKI Sulteng Tahun 2022-2024.....	10
Gambar 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka	11
Gambar 2.4 Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan Capaian Nasional.....	12
Gambar 3.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025	39
Gambar 3.2 Prioritas Nasional	40
Gambar 3.3 Integrasi RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RKP 2025.....	41
Gambar 3.4 Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP 2025	42
Gambar 3.5 Visi RPJPN Tahun 2025-2045	50
Gambar 3.6 Kerangka Perumusan Visi Provinsi Tahun 2025-2045.....	51
Gambar 3.7 Makna Visi Provinsi Tahun 2025-2045	52
Gambar 3.8 Rumusan Misi RPJPD Provinsi 2025-2045.....	55
Gambar 3.9 Prioritas Pembangunan Sulawesi	56
Gambar 3.10 Tema Pembanguna Provinsi Sulawesi Tengah	58
Gambar 3.11 Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah	58
Gambar 3.12 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Pembangunan di Daerah diwajibkan untuk dapat menyusun perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap tuntutan dari keinginan masyarakat luas di daerah masing-masing dan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah telah memuat berbagai usulan dan rencana kerja serta program-program kegiatan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Ranwal Renja untuk tahun 2026 ini pada dasarnya mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026.

Menarik benang merah serta korelasi dan integrasi program dan kegiatan yang terpadu, sangat diperlukan lompatan pemikiran dalam penyusunan Rencana Kerja yang mumpuni, akuntable, terupdate, dengan memperhatikan tolak ukur program/kegiatan berdasarkan output, outcome, benefit, dan impact dari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengusung visi dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan cepat, baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Guna dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah kemudian menyusun Ranwal Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun 2026. Diharapkan dengan perencanaan yang baik dapat menjalankan program pembangunan daerah Sulawesi Tengah dengan cepat dan tepat sasaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

16. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042;
17. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
20. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Ranwal Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 ini adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2026.

Tujuan penyusunan Ranwal Renja tahun 2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman perencanaan bidang kelautan dan perikanan dalam mencapai sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2026 yang mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026.
- b. Memberi penajaman orientasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA. 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2024 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 - 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
 - 2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L
- 2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis
- 2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2025 dan 2026

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA. 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2024

Keberhasilan tujuan dan sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2024 DKP Sulteng telah menetapkan 3 sasaran strategis (SS) dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Perikanan	103,86	93,74	90,26
2	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	2. Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	72,40	71,85	99,24
3	Terwujudnya Kawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,1847	0,1891	102,38
		4. Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	83,98	93,49	111,32

* angka sementara

2.1.1 Analisis capaian kinerja

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis (SS) tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

SS 1: Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan

❖ IKU 1 Nilai tukar perikanan (NTPN)

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani perikanan. NTP diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada sektor perikanan (nelayan dan pembudidaya). NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani perikanan mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani perikanan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani perikanan mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

Mulai Januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun dasar (2012=100)

menjadi tahun dasar (2018=100) baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari Kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

Tahun 2024 target Nilai Tukar Perikanan 103,86 dan terealisasi sebesar 93,74 atau 90,26%. Capaian ini tidak mencapai target.

Tabel 2.2 Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTNP)
Sulawesi Tengah Tahun 2024

Bulan	Indeks harga yang diterima petani perikanan (It)	Indeks harga yang dibayarkan petani perikanan (Ib)	NTNP
Januari	111,19	119,68	92,91
Februari	110,44	119,13	92,71
Maret	113,4	120,24	94,31
April	114,32	120,76	94,67
Mei	112,02	120,92	92,64
Juni	114,72	121,4	94,5
Juli	106,95	115,08	92,93
Agustus	106,88	114,96	92,97
September	114,74	120,98	94,84
Oktober	114,49	120,97	94,64
November	112,52	120,8	93,15
Desember	114,52	121,11	94,56
Rata-rata	112,18	119,67	93,74

Nilai Tukar Perikanan (NTNP) berfluktuasi sepanjang tahun 2024. Secara keseluruhan indeks harga yang dibayar petani perikanan (Ib) lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani perikanan (It). Beberapa hal yang menyebabkan penurunan ini, yakni meningkatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya harga obat/pakan, meningkatnya harga produksi, terbatasnya ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatnya biaya transportasi, cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya.

Sasaran 2 Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan

❖ IKU 2 Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Nilai AKI diperoleh berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar,

dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar.

Target Angka Konsumsi Ikan yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 72,40 Kg/kap/th dan terealisasi dengan angka sementara 71,85 Kg/Kap/Th* atau 99,24%. Capaian ini diperkirakan masih akan naik dengan selesainya proses penghitungan AKI Nasional pada awal semester II. Bila dilihat capaian ini lebih tinggi daripada target AKI Nasional yaitu sebesar 65,64 Kg/Kap/Th.

Kebutuhan terbesar ikan konsumsi rumah tangga selama tahun 2024 antara lain ikan selar, cakalang, dencis, kembung, lema, banyar, tongkol, matang, ekor kuning, teri basah, bandeng dan mujair.

Sasaran 3 Terwujudnya kawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

❖ IKU 3 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah merupakan salah satu amanat UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan KEPMEN-KP NO. 50 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Tolitoli, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, KEPMEN-KP NO. 51 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 52 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, status kawasan konservasi Sulawesi Tengah seluas 1.338.291,55 Ha. Data ini merupakan hasil dari konsultasi publik dan penyamaan data dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP-RI) Tahun 2019.

Tahun 2024 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 0,1847 dan terealisasi 0,1891 atau sebesar 102,38%. Luas perairan Sulawesi Tengah sebesar 74.460,39 Km² dan luas kawasan konservasi sampai dengan tahun 2024 sebesar

14.082,92 Km². Kawasan konservasi perairan Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Tengah s.d. 2024

No.	KKP3K	Kabupaten	Luas (ha)	Kegiatan
1.	DOBOTO	Donggala	1.192,34	Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove
		Toli-toli	56.250,08	Pengembangan Informasi Kawasan
		Buol	17.320,30	Sosialisasi Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang
LUAS KAWASAN			74.762,72	
2.	TOMINI	Parigi Moutong	131.693,59	Pengembangan Informasi Kawasan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove
		Poso	282,87	Pengembangan Informasi Kawasan
		Tojo Una-Una	7.563,40	Pengembangan Informasi Kawasan
LUAS KAWASAN			139.539,87	
3.	DALAKA	Banggai	111.253,93	Pengembangan Rehabilitasi Terumbu Karang
		Banggai Kepulauan	151.273,94	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
		Banggai Laut	633.620,99	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
LUAS KAWASAN			896.148,86	
4.	MOROWALI	Morowali	257.612,03	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
		Morowali Utara	41.983,07	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
LUAS KAWASAN			299.595,10	
LUAS TOTAL			1.408.291,55	

❖ *IKU 4 Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan (%)*

Nilai ini merupakan persentase dari jumlah usaha kelautan dan perikanan yang memiliki ijin (patuh) per total keseluruhan jumlah usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa. Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 83,98% dan terealisasi 93,49% atau sebesar 111,32%. Pada tahun 2024 terdapat 449 pelaku usaha yang diperiksa dan yang patuh sebanyak 418 pelaku usaha.

Selanjutnya, upaya peningkatan kesadaran perijinan ini akan terus dilakukan baik melalui pendampingan, sosialisasi maupun pengawasan. Berikut nama jenis perijinan bidang kelautan dan perikanan serta jumlahnya di Sulawesi Tengah:

Tabel 2.4 Jumlah Persentase Keseluruhan Capaian Tiap Indikator Kinerja dan Kepatuhan Pelaku Usaha yang diperiksa

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian%	Jumlah Unit Yang diperiksa	Jumlah Kepatuhan	Persentase Kepatuhan %
I. Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)						
a. Kapal Penangkap Ikan di Laut	300	319	106	319	292	91,5
b. Kapal Penangkap Ikan di PUD	15	24	160	24	24	100,0
Jumlah	315	343	133	343	316	92,1
II. Jumlah Usaha Budidaya yang diperiksa kepatuhannya (unit)						
a. Budidaya Ikan di Laut	20	24	120	24	24	100,0
b. Budidaya Ikan di PUD	15	15	100	15	15	100,0
Jumlah	35	39	110	39	39	100,0
III. Jumlah Usaha P2HP yang diperiksa kepatuhannya (unit)						
Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (pelaku usaha)	40	45	113	45	45	100,0
Jumlah	40	45	113	45	45	100,0
IV. Jumlah Pemanfaat Kawasan Ruang Laut Sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya (unit)						
Jumlah Pemanfaatan Kawasan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya	15	22	147	22	18	81,8
Jumlah	15	22	147	22	18	81,8
Jumlah Total	405	449	502	449	418	374
Persentase Kepatuhan						93,49

2.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelum

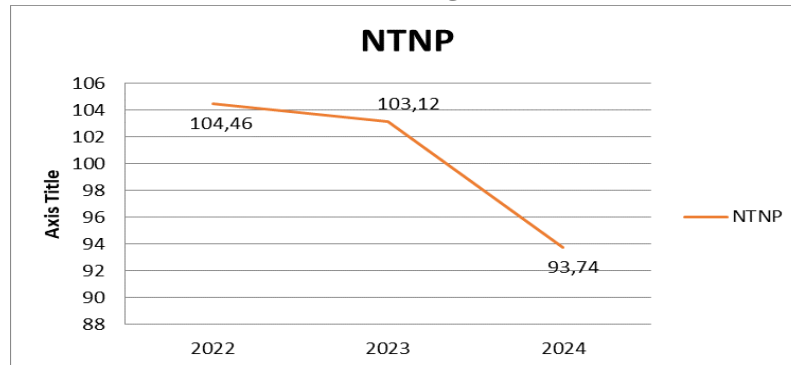
Capaian tahun 2024 ini akan dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022. Perbandingan capaian IKU DKP tahun 2024, 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s/d 2024

No	sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi*	% capaian
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha KP	Nilai Tukar perikanan (NTNP) (%)	100,00	104,46	104,46	100,80	103,12	102,30	103,86	93,74	90,26
2	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	55,39	67,36	121,61	57,05	71,85	125,94	72,40	71,85	99,24
3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan thd total luas perairan teritorial	-	-	-	-	-	-	0,1847	0,1891	102,38
		Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP thd peraturan Per UU	-	-	-	-	-	-	83,98	93,49	111,32

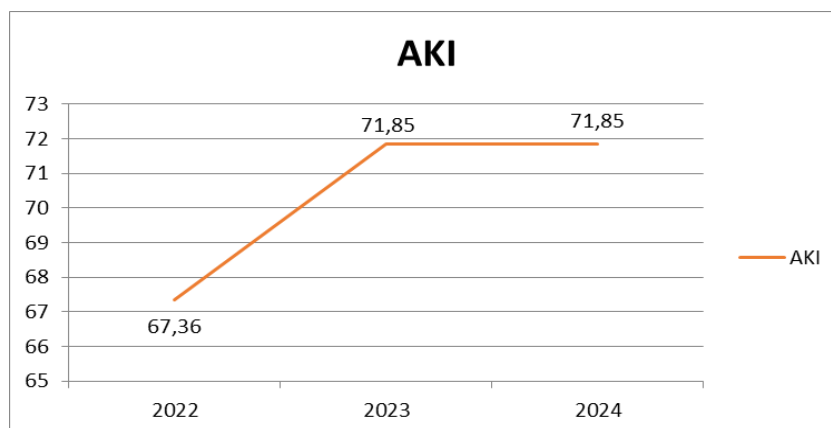
- *Nilai Tukar Perikanan (NTNP)*, Perkembangan NTNP Perikanan Sulteng bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (q to q), NTNP Sulteng cenderung turun. Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 NTNP Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan. Tahun 2022 NTNP 104,46 dan tahun 2023 NTNP 103,12, mengalami penurunan 1,28%. Tahun 2023 NTP sebesar 103,12 dan Tahun 2024 sebesar 93,74 mengalami penurunan sebesar 9,10%. Grafik NTNP tahun 2022 s/d 2024 dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 2.1 NTNP Sulteng Tahun 2022 – 2024



- *Angka Konsumsi Ikan (AKI)*, capaian untuk indikator ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2022 sampai tahun 2024. AKI tahun 2023 sebesar 71,85 naik 6,67% dari tahun 2022. Tahun 2024 masih menggunakan angka sementara yakni 71,85. Nilai ini sama dengan tahun sebelumnya, karena AKI untuk tahun 2024 masih dalam proses penghitungan dipusat. Grafik AKI 2022 – 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.2 AKI Sulteng Tahun 2022 – 2024



- *Rasio Kawasan Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial*, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena satuan target yang berbeda.
- *Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan*, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Indikator ini baru ada di tahun 2024 ini.
- Tahun 2024 DKP memiliki sasaran sebanyak 3 (tiga) dan indikator kinerja sebanyak 4 (empat). Tahun 2023 dan 2022 DKP memiliki sasaran sebanyak 5 (lima) dan indikator kinerja sebanyak 6 (enam).

C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2024 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 DKP Sulteng dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dg Target Jangka Menengah di Renstra 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha KP	Nilai Tukar Perikanan (NTNP) (%)	93,74	103,93	90,19
2	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	71,85	73,4	97,89
3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan thd total luas perairan teritorial	0,1891	0,1884	100,37
		Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP thd peraturan Per UU	93,49	87,98	106,26

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Tingkat kemajuan capaian indikator *Nilai Tukar Perikanan (NTNP)* tahun 2024 hanya mencapai 90,19% dari target Renstra tahun 2026. Jika melihat capaian dari tahun-tahun sebelum, NTNP Sulteng memang sangat berfluktuasi mengingat banyak faktor teknis yang mempengaruhi. Besar harapan kedepannya NTNP Sulteng akan meningkat dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui program-program bantuan kepada nelayan dan pembudidaya;
2. Tingkat kemajuan capaian indikator *Angka Konsumsi Ikan (AKI)* sebesar 97,89% dari target renstra tahun 2026. Tetapi angka ini masih merupakan angka sementara karena AKI 2024 masih dalam proses perhitungan. AKI 2024 diperkirakan akan melebihi angka sementara yaitu 71,85 kg/kap/th, karena jika melihat capaian AKI pada tahun-tahun sebelum, AKI Sulteng selalu melebihi target daerah maupun target nasional;
3. Tingkat kemajuan capaian indikator *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial* telah melebihi target renstra tahun 2026 yakni 100,37%, dimana target adalah 0,1884 dan capaian sebesar 0,1891. Kedepannya angka ini akan terus meningkat mengingat program dan kegiatan konservasi yang terus dilakukan oleh DKP Sulteng;
4. Tingkat kemajuan capaian indikator *Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan* telah melebihi target renstra tahun 2026 yakni 106,26%. Keberhasilan kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DKP baik dalam pendampingan, sosialisasi dan bantuan-bantuan yang diberikan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Standar Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja utama (IKU) DKP Sulteng tahun 2024 dengan capaian Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.4 Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan Capaian Nasional Tahun 2024

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024*	Realisasi Nasional 2024*	% Capaian
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha KP	Nilai Tukar Perikanan (%)	93,74	101,81	92,07
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	71,85	58,91	121,97
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan thd total luas perairan territorial	0,1891	0,042	450,24
	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP thd Peraturan Per-UU	93,49	97,96	95,44

*) angka sementara

Perbandingan capaian IKU Dinas dan Capaian nasional Tahun 2024:

1. Dari tabel diatas dapat dilihat capaian NTNP Nasional lebih tinggi dari capaian NTP Sulawesi Tengah. Dimana capaian nasional sebesar 101,81 dan capaian Sulawesi Tengah hanya 93,74. Secara keseluruhan indeks harga yang dibayar petani perikanan (lb) lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani perikanan (lt). Beberapa hal yang menyebabkan penurunan ini, yakni meningkatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya harga obat/pakan, meningkatnya harga produksi, terbatasnya ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatnya biaya transportasi, cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya;
2. Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Penguatan Daya Saing (DJPDS) menetapkan target nasional untuk indikator *angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)* sebesar 59,00 dan tercapai sementara 58,91* sedangkan target DKP Sulteng sebesar 72,40 dan tercapai 71,85*. Jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian konsumsi makan ikan Sulteng sudah melebihi target nasional. Untuk skala nasional Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-5 (lima) capaian angka konsumsi ikan. Provinsi dengan capaian tertinggi secara berturut-turut adalah Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
3. Tahun 2024 indikator *rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial*, perbandingan kawasan konservasi yang ditetapkan terhadap jumlah kawasan perairan Sulawesi Tengah lebih tinggi 450% jika dibandingkan dengan luas wilayah konservasi nasional terhadap total luas wilayah perairan Indonesia. Hal ini

disebabkan oleh komitmen DKP Sulteng dalam melakukan kegiatan konservasi dan jumlah UPTD konservasi sebanyak 7 wilayah;

4. Capaian indikator *Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Sulawesi* lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional yakni 95,44%. Sekalipun capaian nasional lebih tinggi akan tetapi capaian Sulteng telah melebihi 111,32% dari target daerah yang ditetapkan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja DKP Sulteng tahun 2024 sebesar 100,80%. Dari 4 (empat) indikator yang ada 2 (dua) indikator melebihi target atau dengan capaian diatas 100% dan 2 (dua) lagi tidak mencapai target. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja DKP Sulteng, antara lain:

1. **Nilai Tukar Perikanan**, persentase capaian untuk indikator ini hanyalah 90,26%. Beberapa 100,8 dan terealisasi sebesar 103,12. Capaian ini melebihi target sebesar 102,30%. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan ini, yakni meningkatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya harga obat/pakan, meningkatnya harga produksi, terbatasnya ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatnya biaya transportasi, cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya;
2. **Angka Konsumsi Ikan**, persentase capaian indikator ini sebesar 99,24%. Angka ini masih merupakan angka sementara karena AKI 2024 masih dalam proses perhitungan. AKI 2024 diperkirakan akan melebihi angka sementara yaitu 71,85 kg/kap/th, karena jika melihat capaian AKI pada tahun-tahun sebelum, AKI Sulteng selalu melebihi target daerah maupun target nasional;
3. **Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial**, persentase capaian untuk indikator ini melebihi target yang ditetapkan, yakni 102,38%. Beberapa hal yang menyebabkan pencapaian ini antara lain komitmen DKP Sulteng dalam melakukan kegiatan konservasi dan jumlah UPTD konservasi sebanyak 7 wilayah;
4. **Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**, capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni 111,32%. Keberhasilan kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DKP baik dalam pendampingan, sosialisasi dan bantuan-bantuan yang diberikan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Salah satu tupoksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat unit-unit kerja yang menangani langsung hubungan kepada masyarakat, yaitu: (1) Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) mengurus masalah perizinan usaha perikanan sesuai kewenangan; (2) UPT PMHP (Penerapan Mutu Hasil Perikanan), menangani sewa uji mutu hasil perikanan; (3) UPT Balai Perbenihan, melalui retribusi penjualan produk usaha daerah dengan menyediakan induk dan benih ikan dan udang serta ikan dan udang; (4) UPT Wilayah I sampai dengan VII menangani masalah Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan.

Berikut prosedur operasional dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang menangani pelayanan publik;

a. Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang PRL

Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang PRL memfasilitasi masalah perijinan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulawesi Tengah.

b. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi telah berupaya untuk membantu pelaku usaha melalui sertifikasi mutu yang didasarkan pada hasil pengujian mutu dan pengawasan/monitoring penerapan PMMT mulai dari budidaya, penangkapan ikan, pengolahan sampai siap ekspor.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan No. 9 tahun 1985 dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 31 tahun 2004, pemerintah melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan dari praktek-praktek yang bertentangan dengan bidang kesehatan dan hygiene. Berdasarkan Undang – Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 7 ayat 2, standarisasi nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomkan. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, kewenangan menerbitkan *Health Certificate* (HC) sudah menjadi kewenangan Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sesuai fungsinya sebagai pelayanan jasa dalam pengujian mutu hasil perikanan, dapat digambarkan prosesnya sebagai berikut :

UPT PMHP melakukan pengujian mutu terhadap sampel sesuai permintaan pelanggan meliputi:

- a) Uji organoleptik
- b) Uji Mikrobiologi
 - Analisis Lempeng Total (ALT)
 - *E.Coli*
 - *Salmonella*
- c) Uji Kimia
 - *Cloramphenicol*

c. UPTD Balai Perbenihan Perikanan

UPTD Balai Perbenihan Perikanan di Sulawesi Tengah memiliki dua sub bagian yang menjadi prioritas, yaitu Perbenihan Ikan Air Tawar dan Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut. Perbenihan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, sertifikasi perbenihan Air Tawar dan penyajian serta bimbingan pemanfaatan teknologi anjuran bidang pembenihan air tawar. Dalam pelaksanaan tupoksi perbenihan air tawar didukung oleh 9 (sembilan) unit perbenihan sebagai berikut: (1) BBIS Kalawara (2) BBI Tulo (3) BBI Maenusi (4) BBI Lauwa (5) BBI Wuasa (6) Kolam Langleso (7) Kolam Pakuli (8) BBI Tonusu (9) BBI Bolapapu. Pada BBI dan Kolam tersebut dikembangkan komoditas-komoditas unggulan sebagai berikut :

- 1) Ikan Mas
- 2) Nila Gift
- 3) Ikan Lele
- 4) Ikan Mas Konsumsi
- 5) Ikan Nila Konsumsi

Untuk mengoptimalkan kegiatan usaha, perbenihan perikanan air payau dan laut mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, menyampaikan dan memberikan bimbingan pemanfaatan dengan teknologi anjuran di bidang pembenihan ikan air payau dan laut dimana berlokasi di : (1) BBAP Kampal (2) BBAP Tindaki dan (3) HSRT Mamboro.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, UPTD Balai Perbenihan melayani pembelian benih ikan air tawar, benur udang dan ikan konsumsi dimana masyarakat dapat langsung melakukan transaksi di unit perbenihan bersangkutan. Output dari pembelian benih, benur dan ikan konsumsi itu akan menjadi sumber PAD yang dihasilkan oleh UPTD Balai Perbenihan Perikanan bagi Sulawesi Tengah.

d. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan untuk sektor bidang perikanan tangkap yang bergerak pada obyek pelayanan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPTD ini mengelola unit Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada di beberapa Kabupaten sebagai tempat operasional Pangkalan Pendaratan

Ikan (PPI) di Sulawesi Tengah. PPI yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 10 lokasi, dimana 6 (enam) Pelabuhan sampai dengan tahun 2024 telah beroperasi yaitu: PP Donggala, PP Ogotua, PPI Paranggi, PPI Pagimana, PP Kolonedale dan PPI Mato. Pelabuhan-pelabuhan ini melakukan pelayanan-pelayanan antara lain:

1. Penjualan es balok
2. Sewa Cold Storage
3. Penyewaan Lapak Ikan dan Sayur
4. Layanan Tambat Labuh
5. Layanan Mess Nelayan
6. Perbaikan Jaring
7. Penyewaan Kantin
8. Layanan Air Bersih
9. Penyewaan Gudang
10. Penyewaan Gedung Aula
11. Sewa Tempat Ruang Terbuka

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan selama kurun waktu 2016 – 2021 memberikan dampak positif dan manfaat, akan tetapi tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi.

Berdasarkan tugas dan fungsi, dalam pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni:

**Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang relatif masih rendah	• Nilai Tukar Nelayan yang cenderung menurun setiap tahunnya • Nilai Tukar Pembudidaya yang masih berfluktuatif dengan rata-rata capaian pertahunnya 89,48%	• Kualitas SDM yang belum merata • Tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan
2	Masih rendahnya produksi dan produktifitas perikanan	Rasio rata-rata capaian pertahun perikanan budidaya dan perikanan tangkap masing-masing sebesar 0,88	• Kualitas SDM Pelaku usaha yang belum merata • Masih kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi teknis • Belum optimalnya sarana prasarana pendukung produksi perikanan • Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/ teknologi sederhana • Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas • Sistem pendataan dan informasi yang belum terintegrasi • Keterbatasan BBM bersubsidi dan es • Transformasi teknologi serta inovasi yang belum berjalan baik • Infrastruktur kepelabuhanan yang belum mendukung • Konflik kepentingan dengan pengguna lain • Masih terbatasnya luasan tambak garam terintegrasi dan masih bersifat tradisional
3	Rendahnya daya saing produk perikanan	• Kontribusi PDRB Perikanan yang cenderung menurun • Masih terbatasnya akses permodalan • Persentase produk olahan yang dihasilkan dibandingkan produksi yang ada < 1% • Belum optimalnya sistem logistik	• SDM aparatur dan pelaku usaha yang belum merata • Mayoritas Pelaku Usaha belum memiliki jaminan usaha • Penanganan pasca panen dan penanganan ikan dikapal yang masih konvensional • Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan • Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha
4	Pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif dan efisien	• Tingkat kepatuhan pelaku usaha masih dibawah 100% • Peraturan yang sering berubah dan tumpang tindih	• jumlah PPNS dan pengawas SDKP terbatas • Masih maraknya IUU Fishing • Sistem perijinan belum efektif dan efisien • Mahalnya biaya operasi pengawasan • Kurangnya sarana prasarana penegakan hukum
5	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal	• Rasio kawasan lindung masih rendah, dibawah 20% • Masih banyaknya regulasi pengelolaan ruang laut yang tumpang tindih dan belum optimal • Pemanfaatan ruang laut yang belum sesuai zonasi	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP berkelanjutan • Infrastruktur dasar serta sarana prasarana terutama di pulau-pulau kecil baik bagi aparatur maupun masyarakat yang masih terbatas • Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove, lamun, terumbu karang) • Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang
6	Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan	Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dengan efektif dan efisien	• Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten • Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko • Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP • Keterbatasan sarana prasarana aparatur terutama pada unit-unit pelaksana teknis

Dari identifikasi pada tabel diatas dirangkum akar-akar permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM Pelaku usaha yang relatif rendah
2. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang belum optimal
3. Belum optimalnya sarana prasarana serta infrastruktur pendukung produksi
4. Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/ teknologi sederhana
5. Tranformasi teknologi serta inovasi yang belum berjalan baik
6. Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas
7. Keterbatasan BBM bersubsidi dan es
8. Tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan
9. Sistem pendataan dan informasi yang belum terintegrasi
10. Konflik kepentingan dengan pengguna lain
11. Masih terbatasnya luasan tambak garam terintegrasi dan masih bersifat tradisional
12. Mayoritas Pelaku Usaha belum memiliki jaminan usaha
13. Penanganan pasca panen dan penanganan ikan dikapal yang masih konvensional
14. Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan
15. Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha
16. Masih maraknya IUU Fishing
17. Sistem perijinan belum efektif dan efisien
18. Mahalnya biaya operasi pengawasan
19. Kurangnya sarana prasarana penegakan hukum
20. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP berkelanjutan
21. Infrastruktur dasar serta sarana prasarana terutama di pulau-pulau kecil baik bagi aparaturnya maupun masyarakat yang masih terbatas
22. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove, lamun, terumbu karang)
23. Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang
24. Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko
25. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP
26. Keterbatasan sarana prasarana aparaturnya terutama pada unit-unit pelaksana teknis

2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan:

“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sulawesi Tengah: adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 September 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

Sebagai penjabaran **Visi** RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, maka dirumuskan **Misi** sebagai berikut:

Misi 1: *Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.* Misi ini dimaksudkan untuk

Misi 2: *Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.*

Misi 3: *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.*

Misi 4: *Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.*

Misi 5: *Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.*

Misi 6: *Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.*

Misi 7: *Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.*

Misi 8: *Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.*

Misi 9: *Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.*

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi input dalam perumusan isu-isu strategis dalam pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.7. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
(1)	(2)	(3)	Penghambat	Pendorong
1	Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM	Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dengan efektif dan efisien	a) Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten b) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP c) Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko d) Keterbatasan sarana prasarana aparatur yang memadai terutama pada UPT	a) Adanya payung hukum yang jelas terhadap tupoksi untuk pelayanan umum; b) Peluang untuk sertifikasi ISO 9001:2015 c) Sebagian besar sarana dan prasarana telah ada hanya memerlukan pemeliharaan d) Teknologi informasi yang semakin mudah
	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	a. Rasio rata-rata capaian pertahun perikanan budidaya dan perikanan tangkap masing-masing sebesar 0,88 b. Kontribusi PDRB Perikanan yang cenderung menurun c. Masih terbatasnya akses permodalan d. Persentase produk olahan yang dihasilkan dibandingkan produksi yang ada < 1% e. Belum optimalnya sistem logistik perikanan	a) Sarana prasarana yang ada masih terbatas dan sebagian besar yang telah ada masih konvensional b) Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang belum optimal c) Kualitas SDM Pelaku usaha yang belum merata d) Keterbatasan akses pakan, benih, es serta BBM bersubsidi menyebabkan biaya produksi yang besar e) Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien f) Ketersediaan data dan informasi yang belum terintegrasi g) Pemahaman mengenai system jaminan mutu yang masih kurang h) Mayoritas pelaku usaha masih menggunakan teknologi tradisional i) Mayoritas usaha yang dijalankan masih memiliki resiko tinggi j) Kelembagaan pelaku usaha yang belum optimal k) Masih maraknya konflik kepentingan antar pengguna	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan b) Terbangunnya kesadaran aparatur akan pentingnya pelayanan c) Adanya keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya d) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar e) Ketersediaan teknologi pakan ikan f) Penataan wilayah sistem logistik ikan g) Rekstrukturasasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi h) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan	a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha masih dibawah 100% b. Rasio kawasan lindung masih rendah, dibawah 20% c. Masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan belum optimal d. Pemanfaatan ruang laut yang belum sesuai zonasi	a. Sarana prasarana pengawasan serta pengelolaan ruang laut yang ada masih terbatas b. Kualitas dan kuantitas SDM Pengawas dan pengelola ruang laut yang relatif rendah c. Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien d. Mahalnya biaya operasi pengawas e. Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i> f. Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang	i) Komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan SDKP j) Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut k) Adanya Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu l) Rekonstruksi sarana prasarana dan pengembangan teknologi m) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak n) telah tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Dari 5 Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 1 Misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yakni:

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dengan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L

Telaahan terhadap Renstra K/L dan SDKP Provinsi perlu dilakukan untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sarana Renstra OPD.

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PDB Perikanan (%)	Kualitas SDM Aparatur yang masih relatif rendah	e) Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten	e) Adanya payung hukum yang jelas terhadap tupoksi untuk pelayanan umum;
2	Produksi perikanan (ton)		f) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP	f) Peluang untuk sertifikasi ISO 9001:2015
3	a) Perikanan tangkap		g) Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko	g) Sebagian besar sarana dan prasarana telah ada hanya memerlukan pemeliharaan
4	b) Perikanan budidaya		h) Keterbatasan sarana prasarana aparatur yang memadai terutama pada unit-unit pelaksana teknis	h) Teknologi informasi yang semakin mudah
5	Produksi garam rakyat (juta ton)			
6	NTN/NTPi (%)			
7	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)			
8	Konsumsi ikan (kg/kap/th)			
9	Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola (pulau)	- Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil - Sistem pendataan dan akses informasi yang belum optimal	a) Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan pemerintah
10	Luas kawasan konservasi perairan (ha)		b) Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat	b) Kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang memadai untuk diberdayakan
	Wilayah perairan bebas IUU fishing (%)		c) Pemahaman tentang pentingnya data yang masih kurang	
	Jumlah kasus penolakan ekspor per Negara mitra (kasus)		d) Kualitas dan kuantitas SDM Pengelola data informasi yang relatif masih lemah	
	Jumlah hasil litbang yang inovatif (hasil litbang)	- Kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan yang masih relatif rendah - Belum optimalnya kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan - Masih kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan	e) Keterbatasan sarana prasarana pengolahan informasi dan data kelautan dan perikanan	
	Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih dan disuluh yang kompeten di bidang KP (%)		a) Rendahnya tingkat pendidikan SDM pelaku usaha perikanan	a) Keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidup
			b) Kemampuan kapasitas kelembagaan pelaku usaha masih terbatas	b) Adanya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha yang dilakukan oleh OPD
			c) Masih kurangnya kepercayaan dunia perbankan pada sektor perikanan	c) Mulai banyaknya inovasi teknologi yang dilakukan bidang kelautan
			d) Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pelaku usaha perikanan skala kecil	
			e) Tingkat suku bunga kredit yang masih relatif	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tinggi	perikanan yang melibatkan perbankan
		• Belum optimalnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan • Masih sederhananya teknologi yang diterapkan • Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas • Rendahnya daya saing produk perikanan • Belum optimalnya pemanfaatan pasar di dalam dan luar negeri • Belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan • Terjadinya konflik kepentingan dengan pengguna lain • Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas • Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan • Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien • Belum optimalnya peran masyarakat dalam mengelola kawasan perairan	a) Sarana prasarana yang ada masih terbatas dan sebagian besar yang telah ada masih konvensional b) Kualitas SDM Kelautan Perikanan yang relatif rendah c) Sebagian besar pakan masih didatangkan dari luar negeri d) Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas e) Mahalnya pakan mengakibatkan ongkos produksi yang besar f) Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien g) Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien h) Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum di laut i) Mahalnya biaya operasi pengawas j) Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i>	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan b) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar c) Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan d) Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut e) Penataan wilayah sistem logistik ikan f) Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah g) pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan h) Rekonstruksi sarana prasarana dan pengembangan teknologi i) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak j) Telah tersusunnya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) k) Penguatan regulasi dan kebijakan

2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka RTRW Provinsi adalah merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

RTRW Provinsi disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir dan pemanfaatan ruang kota pantai sebagai amanah yang tercantum dalam pasal 13 pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021, dimana RTRW Provinsi juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan provinsi mutlak ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Provinsi.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan pengutamaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu dimaksudkan pula untuk memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan RTRW Provinsi dilakukan dengan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, dalam penyusunan RTRW Provinsi didasarkan pula pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi antara lain untuk mewujudkan pembangunan Wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial,

ekonomi dan lingkungan berbasis Mitigasi Bencana, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi. Rencana struktur ruang wilayah provinsi mencakup sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Adapun rencana pola ruang wilayah provinsi mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, dalam penyusunan RTRW Provinsi juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun, termasuk KKPRL yang menjadi pengaturan di perairan pesisir; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan zonasi sistem provinsi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 telah memiliki Dokumen RTRW baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 Tentang RTRWP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Pengelolaan wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu mengatasi berbagai berbagai macam permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 34 isu, maka dapat ditarik beberapa isu menjadi 23 isu prioritas yang diprioritaskan penanganannya, yakni: 1) Mengendalikan laju degradasi ekosistem 2) Meningkatkan diversifikasi usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil 3) Mencegah dan menanggulangi erosi/abrasi pantai 4) Mengendalikan upaya pencegahan Illegal Fishing 5) Meminimalisir kerusakan hutan yang berdampak pada perubahan lingkungan pesisir 6) Meningkatkan kelestarian habitat dan ekosistem WP-3-K 7) Mengendalikan dan mengelola pencemaran lingkungan di WP-3-K 8) Membentuk, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan konservasi di WP-3-K 9) Mewujudkan pantai bebas pencemaran oleh sampah 10) Melindungi masyarakat, Infrastruktur dan segenap aset yang ada di wilayah pesisir dari bahaya/dampak bencana dan perubahan iklim 11) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat WP-3-K 12) Mengoptimalkan potensi perikanan yang ramah lingkungan di WP-3-K 13) Meningkatkan usaha-usaha perikanan guna meningkatkan SDM 14) Meningkatkan penerapan kearifan lokal dan peran lembaga tradisional/adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 15) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola WP-3-K 16) Meningkatkan kualitas SDM pesisir dan pulau- pulau kecil 17) Meningkatkan peran armada dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 18) Meningkatkan dukungan transportasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 19) Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan transportasi laut pulau-pulau kecil 20) Meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu 21) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana wisata WP-3-K 22) Penataan dan penegakan aturan reklamasi 23) Menanganan dampak perubahan garis pantai dan mitigasi bencana Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, kebijakan pembangunan daerah

dan nasional serta mempertimbangkan kecenderungan kondisi global, lokal dan regional telah dirumuskan visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah. Perumusan Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini telah pula memperhatikan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Tengah.

Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah “Terwujudnya Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Bersih, Indah, Produktif, Berdayaguna, Aman, Dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Visi tersebut diatas mengandung pengertian sebagai berikut : 1. Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Bersih 3. Indah 4. Produktif mengandung pengertian bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, wisata serta jasa-jasa lingkungan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. 5. Berdayaguna 6. Aman 7. Berkelanjutan

Misi rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Tengah meliputi: a. Ekologi 1. Memelihara dan mengembangkan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Menata pemanfaatan ruang dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Meningkatkan dan memelihara kualitas serta daya dukung lingkungan hidup; dan 4. Meningkatkan upaya mitigasi bencana. b. Ekonomi 1. Mengembangkan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana 3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 6. Meningkatkan peran sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 7. Meningkatkan lapangan kerja c. Sosial Budaya 1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Melestarikan nilai-nilai budaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan d. Kelembagaan 1. Meningkatkan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Penguatan kelembagaan antar sektor terkait dalam usaha pelestarian dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu.

Tabel 2.9 Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	meningkatkan fungsi sistem perlindungan dan pengamanan pantai dari erosi/abrasi	a. pengkajian dan pemetaan potensi daerah rawan abrasi dan sedimentasi; b. pemanfaatan perlindungan alamiah berupa mangrove dan/atau buatan dengan menambah bangunan pelindung pantai seperti bronjong/<i>groin</i>, <i>breakwater</i> untuk memperkuat pantai; c. peningkatan pemeliharaan pantai dan mengendalikan faktor- faktor yang dapat merusak sistem perlindungan pantai, terutama faktor- faktor yang berasal dari perbuatan manusia; d. pensosialisasian pengelolaan yang baik untuk pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan mematuhi daerah sempadan pantai; e. penanaman/penghijauan dan pegelolaan di hulu dan sepanjang DAS; f. peningkatan keamanan pantai secara buatan/struktural; g. Pensosialisasian kawasan perlindungan pantai dan sungai di mana untuk pantai sebesar 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dan sungai selebar 50 m.
	Memelihara dan mengembangkan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem, melalui pengembangan pengelolaan KKP3K, KKPD, KKM dan kawasan konservasi lainnya b. peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, melalui penyelenggaraan RHL serta pengelolaan DAS; c. pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan untuk mendukung pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan IPTEK; dan d. pengembangan perlindungan biota laut langka
3	mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan WP-3-K; dan b. pengawasan terhadap pelaksanaan RKL-RPL dan AMDAL di setiap unit industri di WP-3-K.
4	menginisiasi pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi WP-3-K	a. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; dan b. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara proporsional.

5	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi W P-3-K	a. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; b. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara proporsional; c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai; d. peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi; e. peningkatan pemahaman dan pengetahuan pemerintah daerah akan pentingnya penyelamatan SDA ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; peningkatan sistem informasi terkait dengan aturan dan keberadaan Taman Nasional, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; pembangunan rencana kelola bersama antara pemerintah daerah dengan pengelola Taman Nasional, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembangunan koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar pemangku kepentingan.
6	melindungi kawasan konservasi WP-3-K, suaka perairan, dan keanekaragaman hayati lainnya	a. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; dan b. pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara berkelanjutan.
7	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim	a. peningkatan Komunikasi-Informasi-Edukasi mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim dengan ditunjang oleh bahan-bahan komunikasi yang dibutuhkan; b. peningkatan kampanye mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim melalui pendidikan formal; dan c. pengintensifan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim kepada masyarakat.
8	mengembangkan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap	a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap; b. pembinaan secara intensif melalui diseminasi dan penyediaan unit-unit percontohan perikanan budidaya yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat dengan sistem pendampingan; c. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; d. peningkatan manajemen dan teknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; dan e. peningkatan manajemen dan koordinasi kawasan minapolitan.
9	mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif secara terpadu	peningkatan produktivitas dan daya saing
10	mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif pemanfaatan jasa-jasa lingkungan pesisir	a. peningkatan pemberdayaan masyarakat/ kelompok masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan pesisir melalui pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat; dan b. penggalangan kemitraan usaha antara korporasi dan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata bahari.

11	mengembangkan aneka produk pengolahan hasil kelautan dan perikanan	a. pengembangan pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan; dan b. penggalangan kemitraan usaha antara swasta dan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata bahari.
12	meningkatkan stok atau ketersediaan sumberdaya ikan bagi kelangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir	a. pengkajian stok (stock assessment) sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah; b. pengevaluasian perijinan, tingkat pemanfaatan, pelaksanaan aturan jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan; dan c. pemulihan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove
13	Mengembangkan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	a. pengembangan kawasan minapolitan budidaya/tangkap melalui pengintegrasian sentra-sentra produksi menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah; b. pengembangan usaha budidaya perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; dan c. peningkatan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
14	meningkatkan transportasi laut beserta pendukungnya	pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut.
15	meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi laut dan keterpaduan antar moda dari dan ke pulau-pulau kecil	a. peningkatan jumlah angkutan laut; dan b. pembinaan usaha jasa pelayaran rakyat
16	meningkatkan sarana dan prasarana wisata bahari	a. pengembangan sarana dan prasarana wisata bahari yang berbasis masyarakat melalui kemitraan; dan b. peningkatan perencanaan wisata terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan secara terkoordinasi.
17	mengembangkan objek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal	a. pembangunan sistem promosi pariwisata yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan; b. pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari; c. pengsinergian pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran di kabupaten dan kota; d. pembangunan partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang di dukung swasta; dan e. pembangunan sistem promosi pariwisata yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan.
18	mewujudkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir	pengembangan dan peningkatan program pelestarian ekosistem berbasis masyarakat
19	mewujudkan pantai lestari, indah, dan bebas sampah	a. penggalangan kerja sama regional dan kerja sama antara Kabupaten di wilayah pesisir dalam upaya mengurangi beban masuknya sampah ke perairan Sulawesi Tengah; b. penggalangan aksi-aksi kebersihan pantai secara rutin melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut; c. peningkatan dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam gerakan kebersihan pantai; dan d. pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah.

20	meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana	a. pengidentifikasian dan merencanakan tempat dan jalur evakuasi; b. pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada untuk tempat evakuasi; c. pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas baru untuk mitigasi dan adaptasi bencana; d. peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan e. pengembangan sadar bencana
21	menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di wilayah WP-3-K	a. peningkatan kapasitas SDM masyarakat WP-3-K; b. pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif di kalangan masyarakat WP-3-K; c. pensinergian program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat WP-3-K lintas sektor dan antar level pemerintahan; d. dan penggalangan kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat WP-3-K.
22	meningkatkan penerapan kearifan lokal berdasarkan tradisi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. pengkajian nilai-nilai kearifan lokal berbasis tradisi lokal dan pembinaan dalam penerapannya melalui lembaga-lembaga tradisional/adat; dan b. pengembangan dan pengintegrasian aturan-aturan/nilai-nilai/tradisi dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
23	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K	a. pengembangan sistem insentif bagi organisasi dan lembaga lokal yang berpartisipasi dalam pengelolaan WP-3-K; b. pelibatan organisasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. pelibatan pemangku kepentingan dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial.
24	mengurangi konflik masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K	a. pengembangan mata pencaharian alternatif; b. pengembangan solidaritas dan aksi kolektif; c. pemetaan konflik dan penyusunan zonasi wilayah pesisir dengan pelibatan pemangku kepentingan; dan d. pembangunan koordinasi antar instansi dan koordinasi antar kabupaten/ kota.
25	meningkatkan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan keterjangkauan/aksesibilitas pendidikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan b. perubahan paradigma masyarakat agar berorientasi pada pendidikan.
26	meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	a. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pada SMA unggulan di bidang kelautan dan/atau SMK kelautan; dan b. pengintegrasian dan mengimplementasikan materi pelajaran tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam kurikulum muatan lokal pada sekolah tingkat menengah atau sederajat.

27	meningkatkan kesejahteraan masyarakat di WP-3-K	a. pemberdayaan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam usaha pengolahan hasil perikanan; b. pengembangan usaha budidaya air payau dan air laut di WP-3- K; c. pengembangan produksi pangan di pulau-pulau kecil; d. pengembangan pengolahan dan konsumsi pangan alternatif; e. peningkatan akses pangan masyarakat; f. peningkatan akses masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan dan ekonomi; dan g. peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal.
28	meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah	a. penguatan komitmen Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan DPRD untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan manajemen penanggulangan bencana melalui pembentukan lembaga khusus Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanat peraturan perundangan; b. penguatan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumberdaya manusia yang profesional; c. monitoring dan evaluasi kecakapan lembaga dalam melakukan mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim; d. Penguatan kemampuan institusi untuk implementasi kebijakan penanganan bencana dan dampak perubahan iklim; e. penguatan komitmen, kesepahaman dan kerja sama yang kuat mengenai peran dan tanggung jawab institusi di luar lingkungan Pemda dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim; f. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana serta melengkapi dan menyempurnakan SOP yang telah ada; g. penyusunan peraturan daerah yang diperlukan untuk menunjang upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara efektif;
29	meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K	a. pengembangan dan penguatan lembaga-lembaga lokal dalam pengelolaan WP-3-K; dan b. pengembangan aspek pasar dan peningkatan nilai tambah produk.
30	meningkatkan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau- pulau kecil	a. pendataan dan pemetaan yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau- pulau kecil; b. pembinaan manajemen organisasi; dan c. Penyediaan fasilitas/ sarana/ prasarana
31	menyediakan peraturan perundang- undangan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku	a. pengkajian akademik penataan hukum pengelolaan WP3K di daerah; b. penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub mengenai pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penjabaran dari peraturan perundangan; c. pembangunan komitmen DPRD untuk mengakomodasi proses legislasi pembentukan peraturan daerah mengenai pengelolaan WP-3-K; dan d. pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses pembuatan produk hukum.

Sumber : RSWP-3K Sulteng

2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi

a) Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	RTRW terkait Tugas & Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dislutkan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Budidaya Provinsi (Kawasan Andalan (Kadal) dan Kawasan Strategis Provinsi)	- Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di wilayah pesisir dan PPK - Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan dan perikanan - Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait pengendalian pemanfaatan SDKL - Terjadinya konflik kepentingan dengan pengguna lain - Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas - Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien	- Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam - Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat - Keterbatasan sarana prasarana pengolahan informasi dan data kelautan dan perikanan - Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien - Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum di laut - Mahalnya biaya operasi pengawas - Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i>	- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar - Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut - Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan; - Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah - Pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan - Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi - Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak - Telah tersusunnya materi teknis perairan pesisir yang terintegrasi dengan ruang darat dalam RTRWP Sulteng 2023-2042 - Penguatan regulasi dan kebijakan (telah terbitnya Perda no. 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan

2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan dinas, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah pada renstra PD, implikasi RTRW bagi pelayanan PD dan implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Tabel 2.11 Identifikasi Isu Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Isu lingkungan	- Degradasi kondisi ekosistem lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil - Masih maraknya pencurian terumbu karang dan penebangan mangrove - Pencemaran wilayah pesisir yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan pertambangan	- Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal - Kualitas SDM - Koordinasi antar instansi belum optimal - Sistem pendataan dan akses informasi yang masih terbatas	
2	Isu Illegal fishing	- Penurunan stok ikan <i>Overfishing</i> akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat	- Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan masih terbatas - Konflik kepentingan dengan pengguna lain - Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien	
3	Isu ketahanan pangan	- Harga komoditas fluktuatif, cenderung turun, nelayan/pembudidaya ikan merugi - Masih rendahnya minat pulau usaha budidaya untuk sertifikasi unit usahanya bagi keperluan <i>food safety</i> dan jaminan mutu - Sempitnya lahan perairan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha perikanan budidaya - Angka kemiskinan masih relatif tinggi, terutama di kalangan nelayan di wilayah pesisir	- Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya - Inovasi teknologi pada usaha perikanan - Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas - Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan - Terbatasnya sarana prasarana produksi - Belum optimalnya peran dan fungsi Sentra-sentra perikanan - Konflik kepentingan antar pengguna misalnya nelayan yang masih marak terkait pemanfaatan pengelolaan ruang laut	
4	Persaingan pasar global dan industrialisasi	- Rendahnya daya saing produk perikanan kelautan - Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah	- Keterbatasan infrastruktur dasar - Terbatasnya akses permodalan - Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien	

Melalui penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, maka dilakukan penentuan isu-isu strategis, yakni:

1. Kualitas SDM kelautan dan perikanan baik aparatur maupun pelaku usaha;
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
3. Pengawasan dan penegakan hukum.

2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran, pada tahun anggaran 2026 ditetapkan beberapa beberapa usulan program dan kegiatan yang terangkum dalam anggaran APBN dan APBD, sebagai berikut:

A. Program APBN Tahun 2026

Pada APBN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 6 program besar sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Keuangan KKP, (2) Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP, (3) Pengelolaan Data Statistik dan Informasi
2. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, (2) Pengendalian Penangkapan Ikan, (3) Pengelolaan Kenelayanan, (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI), (5) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.
3. Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dengan kegiatan: (1) Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, (2) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan, (3) Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, (4) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya, (5) Pengelolaan Pakan Ikan.
4. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, (2) Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan, (3) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, (4) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen DJPDSPKP.
5. Program pengelolaan kelautan dan ruang laut dengan kegiatan : (1) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, (2) Perencanaan Ruang Laut, (3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen PRL.
6. Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Operasional Kapal Pengawas, (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, (3) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP.

Program prioritas KKP meliputi lima kebijakan ekonomi biru yang mencakup:

- a) Penambahan luas kawasan konservasi laut dengan Meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap CO₂ dan memproduksi O₂;
- b) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dengan Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan
- c) Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan dengan Mengurangi tekanan sumber daya ikan di laut, memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor berbasis komoditas unggulan;
- d) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan
- e) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan dengan Menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat

Menu dan rincian Kegiatan DAK Provinsi 2026 yang akan diusulkan meliputi:

- 1) Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi), berupa: (1) Penahan Gelombang (*breakwater*) (2) Turap Penahan Tanah (*revetment*) (3) Dermaga (4) Kolam Pelabuhan (5) Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan Perikanan (6) Tempat Pemasaran Ikan (7) Fasilitas Air (Tawar) Bersih (8) Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) (9) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (10) Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur serta (11) Rehabilitasi Pabrik Es/*Cold Storage*
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), berupa (1) Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/Tandon/Bak Pendederan (2) Pembangunan Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/ Calon Induk/ Pakan Alami/Tandon/Bak Pendederan (3) Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan/atau Buang (keluar) (4) Pembangunan Saluran Air Pasok (masuk) dan/atau Buang (keluar) (5) Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi (6) Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk (7) Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan (8) Penyediaan Sumber Air
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi, dan
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2026, terdapat beberapa program yang diusulkan oleh Sulawesi Tengah, yaitu :

- 1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan(UPTD Provinsi), yang difokuskan pada PPI Mato, Banggai Laut, PPI Lafeu, Kabupaten Morowali dan PPI Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) pada HSRT Mambo, BBI Wuasa, BBI Tonusu dan BBAP Tindaki.
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi – Provinsi pada 4 KKPD dan lokasi prioritas pengawasan.

B. Program APBD Tahun 2026

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan susunan Program/ Kegiatan untuk dana yang bersumber dari APBD dimana sebelumnya terdiri dari 6 (enam) program dan 27 kegiatan menjadi sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, meliputi (1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2) Administrasi Keuangan (3) Administrasi Umum (4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, meliputi (1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar

Minyak dan Gas Bumi (2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (3) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (3) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; (4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut; (5) Pencadangan kawasan konservasi; (6) Pelibatan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut; (7) Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan; (8) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; (9) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (10) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut; (11) Pencadangan kawasan konservasi; (12) Melibatkan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut; (13) Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan.

- 3) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, meliputi (1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (4) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (5) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (6) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (7) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (8) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (9) Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (10) Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; (11) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (12) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (13) Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di

wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (14) Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (15) Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; (16) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan; (17) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (18) Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (19) Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (20) Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; (21) Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; (22) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan.

- 4) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, meliputi (1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (2) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (3) Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (4) Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (5) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (6) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
- 5) PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, meliputi : (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; (3) Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (4) Pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, meliputi :
- (1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - (2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - (3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - (4) Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri;
 - (5) Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri;
 - (6) Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar;
 - (7) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - (8) Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan Pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar;
 - (9) Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar
 - (10) Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri;
 - (11) Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri;
 - (12) Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar;
 - (13) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - (14) Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar;
 - (15) Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar;

Keenam program ini didorong dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan dimana ditargetkan akan mencapai 8% di akhir periode Renstra dan peningkatan produktifitas komoditas perikanan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

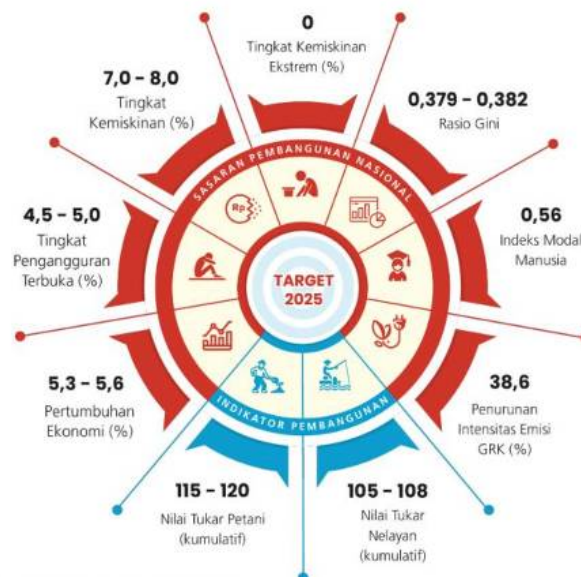
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Sinergitas Dokumen-Dokumen Perencanaan dalam mendukung Program Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2025 berpedoman pada 8 (delapan) Sasaran Pembangunan dan 5 (lima) Agenda Pembangunan.

Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 (lima) arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu Penambahan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Gambar 3.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.



Gambar 3.2
Prioritas Nasional

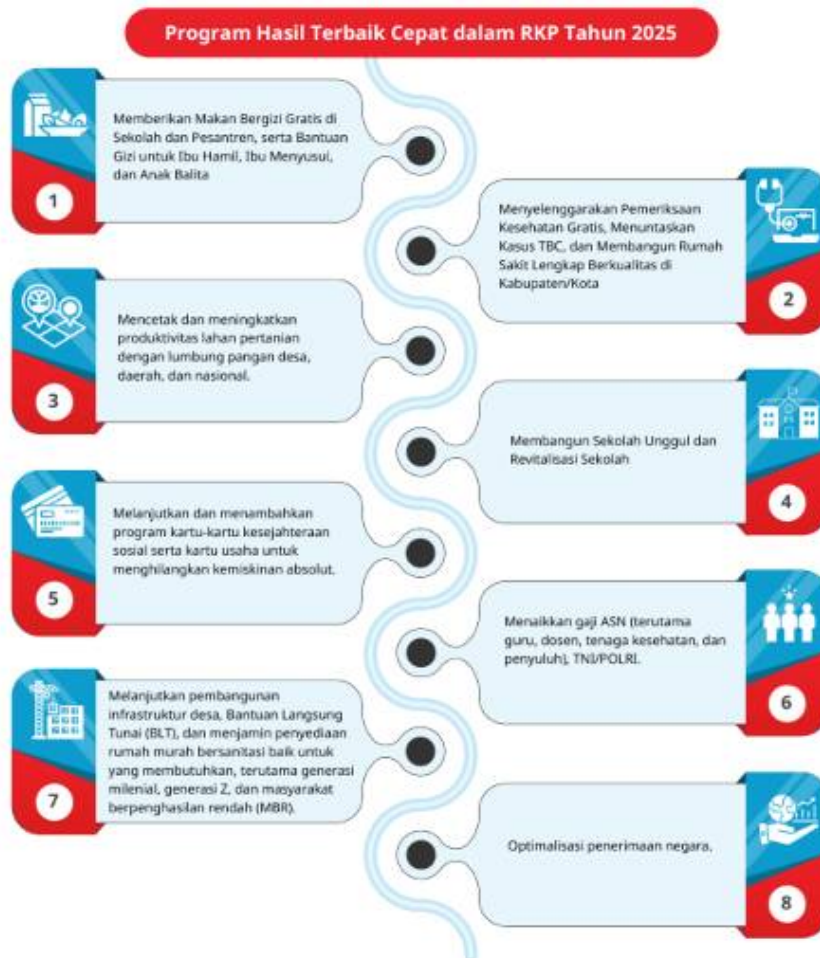
Arah pembangunan Indonesia ditujukan untuk mengawal pencapaian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045. Sebagaimana disampaikan pada bagian awal, bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional. Keselarasan prioritas nasional dengan agenda transformasi sebagai koridor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diuraikan pada infografis berikut ini.

Gambar 3.3
Integrasi RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RKP Tahun 2025



Transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Gambar 3.4 Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025



Arah Kebijakan pada Prioritas Nasional 2

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui (a) penguatan pertahanan negara; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) penguatan sistem keamanan negara; (d) profesionalisme pelayanan kepolisian; (e) penguatan keamanan laut dan hidro oseanografi; (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (g) penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy; (h) diplomasi ekonomi; dan (i) hubungan internasional yang kondusif. (2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) swasembada pangan; (b) swasembada energi; (c) swasembada air; (d) pemenuhan akses air minum aman; serta (e) percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat; (3) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif,

inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) ekonomi syariah; (b) ekonomi digital; (c) ekonomi sirkular industri; (d) pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (f) penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara partisipatif (hulu); (g) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir); (h) pembangunan rendah karbon; (i) tenaga kerja hijau; (j) pengelolaan hutan lestari; serta (k) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut. (1) Penguatan pertahanan negara dilaksanakan melalui (a) peningkatan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia; (b) perkuatan komponen cadangan; (c) peningkatan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara; (d) perkuatan kapabilitas Badan Pertahanan Siber; (e) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (f) peningkatan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar; (g) perkuatan instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (h) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (i) pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata strategis. (2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui (a) percepatan peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; (b) peningkatan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri; (c) mendorong pembentukan ekosistem industri pertahanan; (d) percepatan transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest; dan (e) peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan dan keamanan. (3) Penguatan sistem keamanan negara dilaksanakan melalui (a) sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme; (b) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara; (c) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia; (d) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar-instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi

terorisme; (e) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; serta (f) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme. (4) Profesionalisme pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui (a) peningkatan jumlah dan proporsi polwan; (b) peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (c) penguatan kapabilitas Polisi Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel Polisi Republik Indonesia; serta (e) perkuatan polisi dalam rangka sinergi antar-instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme. (5) Penguatan keamanan laut dan hidro oseanografi dilaksanakan melalui (a) penguatan perkuatan strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut; (c) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia, dan *choke point*; (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut; serta (e) pemetaan batimetri dan alur laut. (6) Keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui (a) penguatan perkuatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (b) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (c) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (d) operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis. (7) Penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy* dilaksanakan melalui (a) pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur *smart diplomacy*; (b) pelibatan aktif dan perluasan akses fasilitas bagi diaspora Indonesia; serta (c) penguatan dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. (8) Diplomasi ekonomi dilaksanakan melalui (a) penguatan kerja sama pembangunan internasional; (b) diplomasi ekonomi yang adaptif; (c) diplomasi ekonomi strategis dengan mitra utama; (d) diplomasi ekonomi dengan negara tetangga, perbatasan, regional, dan subregional; (e) kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil; serta (f) proses akses Indonesia ke *Organisation for Economic Co-operation and Development*. (9) Hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui (a) intensifikasi penyelesaian batas maritim dan batas darat serta penguatan diplomasi kedaulatan; (b) penguatan supremasi dan kepemimpinan Indonesia dalam fora dan organisasi internasional; (c) peningkatan peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia; serta (d) intensifikasi diplomasi publik dan budaya, serta memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia. (10) Swasembada pangan dilaksanakan melalui (a) pengembangan kawasan sentra produksi pangan Kalimantan Tengah, Sumatera Utara,

Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Selatan; (b) pengembangan lumbung pangan nasional; (c) penguatan cadangan pangan; (d) pengembangan pangan akuatik (*blue food*); (e) pengembangan pangan hewani; (f) pengembangan pangan nabati; (g) penganekaragaman konsumsi pangan; (h) penjaminan mutu dan keamanan pangan; (i) biofortifikasi dan fortifikasi pangan; (j) penguatan pangan lokal; (k) penanganan kerawanan pangan dan gizi; (l) penguatan satu data pangan; (m) pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan (*food loss & waste*); (n) stabilisasi pasokan dan harga pangan; (o) pelaksanaan *one health*; (p) hilirisasi komoditas pertanian strategis/unggulan; (q) pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam; (r) modernisasi dan digitalisasi pertanian yang adaptif dan inklusif; (s) penguatan regenerasi petani; serta (t) pendayagunaan pertanian berkelanjutan. (11) Swasembada energi dilaksanakan melalui (a) peningkatan penyediaan energi, (b) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta (c) penguatan implementasi transisi energi. (12) Swasembada air dilaksanakan melalui (a) pembangunan dan pengelolaan sumber air, (b) penyediaan pasokan air berkelanjutan, (c) pengelolaan risiko daya rusak air, dan (d) rehabilitasi hutan dan lahan. (13) Pemenuhan akses air minum dilaksanakan melalui (a) pengembangan sistem penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir, (b) pengamanan dan pengawasan kualitas air minum, (c) penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan sistem penyediaan air minum, serta (d) peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan air minum. (14) Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat dilaksanakan melalui (a) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim; (b) penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim; (c) penyusunan dan penerapan pengaturan untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi aman dan berkelanjutan; (d) pengembangan ekosistem berbasis inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan sanitasi; serta (e) penguatan peran masyarakat dalam penyediaan dan penyelenggaraan sanitasi yang aman. (15) Ekonomi syariah dilakukan melalui (a) peningkatan nilai tambah dan daya saing industri halal; (b) peningkatan ekspor produk halal berdaya saing global dan penguatan kerja sama ekonomi syariah internasional; (c) penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah halal; (d) penguatan peran keuangan syariah untuk pembiayaan pembangunan; serta (e) peningkatan peran dana sosial syariah. (16) Ekonomi digital dilakukan melalui (a) penguatan ekosistem infrastruktur ekonomi digital, dan (b) penguatan ekosistem industri digital lingkup ekonomi. (17) Ekonomi sirkular industri dilaksanakan melalui (a) penerapan efisiensi sumber daya dan perpanjangan daya guna, (b) pengembangan produk ramah lingkungan, serta (c) penguatan ekosistem daur ulang. (18) Pengelolaan

keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik dilakukan melalui (a) penguatan pengelolaan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (b) pemulihan ekosistem yang terdegradasi; (c) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (d) pengendalian spesies asing invasif; (e) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (f) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan; (g) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (h) pengembangan bioprospeksi serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik; dan (i) pengelolaan bioteknologi serta keamanan hayati (*biosafety*). (19) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilakukan melalui (a) peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (b) peningkatan pengelolaan air limbah; (c) peningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (d) peningkatan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (e) peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (f) peningkatan kualitas lahan; (g) penurunan laju deforestasi; (h) peningkatan kualitas ekosistem gambut; (i) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; (j) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (k) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (l) peningkatan sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam rangka penegakan hukum lingkungan di pusat dan daerah serta pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang; (m) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (n) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (20) Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga secara partisipatif (hulu) dilakukan melalui (a) pengurangan dan pemilahan sampah di sumber serta pengumpulan dan pengangkutan terpilah terjadwal; dan (b) penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah. (21) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir) dilakukan melalui (a) pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil; (b) peningkatan sampah terolah di tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pemrosesan akhir, dan *landfill mining*; serta (c) reformasi tata kelola persampahan. (22) Pembangunan rendah karbon dilakukan melalui (a) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral, (b) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (c) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (d) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (e) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (f) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (g) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, dan (h) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

(23) Tenaga kerja hijau dilakukan melalui (a) pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau, (b) pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau, serta (c) penguatan peran asosiasi serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau. (24) Pengelolaan hutan lestari dilaksanakan melalui (a) peningkatan produktivitas hutan, (b) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri, (c) penguatan pengelolaan hutan lestari, (d) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari, serta (e) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan. (25) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dilaksanakan melalui (a) penguatan tata kelola ekonomi biru; (b) peningkatan pengelolaan ekosistem, kawasan konservasi perairan, dan pesisir; (c) pengembangan industrialisasi berbasis sumber daya alam perikanan dan kelautan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan; (d) penguatan industri manufaktur perkapalan dan bahan baku perkapalan; (e) penguatan sistem logistik, transportasi, dan perdagangan jalur perairan; (f) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan; serta (g) peningkatan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi biru serta peningkatan sumber daya manusia maritim. Selain intervensi yang telah dijabarkan, terdapat juga dukungan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran prioritas nasional yaitu (1) mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; (2) memperluas akses energi bersih untuk masyarakat; serta (3) pembangunan dan pengelolaan sumber air.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, diperlukan kerangka regulasi sebagai berikut (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diperlukan untuk menjawab permasalahan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara instansi yang mengampu urusan persampahan dan belum dimuatnya amanat ekonomi sirkuler. Materi muatan perubahan meliputi optimalisasi pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mempertegas kelembagaan pengelolaan sampah antara operator, regulator, dan pengawas, dan memuat amanat ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah. (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI diperlukan untuk meredefinisi cakupan veteran dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap perlindungan dan kesejahteraan

veteran. Perubahan ini juga dilaksanakan untuk menyesuaikan pengaturan sanksi dan denda sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (3) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber didasari oleh salah satu cerminan dinamika ancaman keamanan nasional yaitu peningkatan jumlah serangan siber berbentuk malware ke Indonesia. Penggunaan dan pemanfaatan ruang siber di segala aktivitas saat ini dapat berpotensi buruk jika disalahgunakan oleh aktor yang tidak bertanggung jawab. Rancangan Undang-Undang Keamanan Ketahanan Siber ini akan mengisi kekosongan hukum terhadap kebutuhan pengaturan terkait pembangunan dan penjaminan sistem keamanan dan ketahanan siber di Indonesia yang saat ini masih bersifat sektoral. (4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Persampahan Terpadu Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Persampahan Terpadu diperlukan untuk mengisi celah atau ketidakjelasan pengaturan pengelolaan sampah yang ada di dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Materi muatan yang diperlukan dalam Rancangan Peraturan Presiden ini meliputi prinsip pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan, klasifikasi dan strategi peningkatan kinerja layanan pengelolaan sampah, pembagian peran antar-pihak, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan layanan pengelolaan sampah. (5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional Rancangan Peraturan Presiden merupakan perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Saat ini Rancangan Peraturan Presiden sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017. Revisi Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional dilakukan sejalan dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang saat ini sudah dalam tahap harmonisasi. Revisi Peraturan Presiden Rencana Umum Energi Nasional dilakukan untuk mengakomodir arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Materi muatan Rancangan Peraturan Presiden ini meliputi pemutakhiran terhadap target-target, penjabaran arah kebijakan, sasaran, dan peran masing-masing pemangku kepentingan pemerintah dalam pembangunan ketahanan energi. (6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan diperlukan untuk menerapkan pengelolaan susut dan sisa pangan yang berfokus pada penyelamatan pangan demi

mencapai sasaran ketahanan pangan dan gizi. Materi muatan Rancangan Peraturan Presiden meliputi penerapan insentif disinsentif, fasilitasi sarana dan prasarana penyelamatan pangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, pembentukan forum koordinasi penyelamatan susut dan sisa pangan, serta pengembangan standar penyelamatan pangan. (7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional merupakan perintah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini diperlukan untuk mengarahkan perencanaan pangan nasional ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. (8) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih Rancangan Peraturan Presiden merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan tata ruang darat dan laut, serta meningkatkan potensi ekonomi laut yang berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut berkelanjutan, mempermudah investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. (9) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Utara Papua Rancangan Peraturan Presiden merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan tata ruang darat dan laut, serta meningkatkan potensi ekonomi laut yang berada di kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut berkelanjutan, mempermudah investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, antara lain: (1) Penataan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan Platform Transformasi Sistem Pengelolaan Persampahan Nasional; (2) Penataan Kelembagaan dan Fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

3.1.2 Rekomendasi Kebijakan berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada pasal 1 ayat (27) menyebutkan bahwa RPJMD Teknokratik adalah Rancangan Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

serta Pasal 171 ayat (1) dan (2), bahwa arah kebijakan RPJPD merupakan prioritas Pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan yang wajib dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon kepala daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenan. Olehnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan rekomendasi secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta mempedomani prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Rekomendasi dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis Pembangunan daerah yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan pokok dari hasil analisis capaian Pembangunan daerah. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan Rekomendasi RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan Pembangunan serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Rekomendasi yang telah disusun harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Program dan kegiatan. Rekomendasi menggambarkan Upaya transformasi dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional serta menggambarkan Upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Untuk menyambut Indonesia Emas 2045, Visi abadi Indonesia telah diterjemahkan ke dalam Visi Indonesia Emas 2045 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yaitu: **Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.**



Gambar 3.5
Visi RPJPN Tahun 2025-2045

Selanjutnya untuk berkontribusi dalam Indonesia Emas 2045, Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Visi Provinsi Sulawesi Tengah 2045 yang mampu menjadi jembatan antara penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah dan harapan negara pada momen Indonesia Emas 2045. Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan perkuatan fondasi transformasi dan akselerasi transformasi, dan ekspansi global disegala bidang untuk mencapai Sulawesi Tengah Emas di Tahun 2045. Di momen Indonesia emas, Provinsi Sulawesi Tengah harus menjadi daerah maju sehingga dibutuhkan kemampuan menghasilkan produk-produk berbasis pertanian dan industri berbasis sumber daya alam yang mampu berekspansi secara global serta memberikan berbagai sumbangsih yang positif di Tahun 2045. Untuk itu ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2045 adalah:

SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

Berangkat dari Visi diatas, merupakan keinginan dan harapan cita-cita seluruh masyarakat agar Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang maju, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Adapun kerangka Visi Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.6
Kerangka Perumusan Visi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Adapun makna atau arti dari Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :



Gambar 3.7
Makna Visi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Sedangkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian adalah sistem pertanian yang menggambarkan terjadinya perubahan paradigma pembangunan pertanian di Sulawesi Tengah dari pertanian tradisional dan dari pertanian subsistem menjadi pertanian yang maju. Pertanian yang maju dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan produktivitas seiring dengan meningkatnya kualitas SDM Petani dan produk pertanian yang aman dan sehat. Pertanian yang maju mampu menjamin keamanan ketersediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan, serta kemampuan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Penyelenggaraan kegiatan pertanian yang maju didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi, benih berkualitas tinggi, hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang berkualitas premium dan organik. Pertanian yang maju menerapkan mekanisasi pertanian berteknologi tinggi yang menggunakan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* yang diterapkan pada *smart farming* atau pertanian pintar. *Smart farming* adalah konsep manajemen bercocok tanam yang mengandalkan bantuan teknologi canggih seperti data besar (*big data*), penyimpanan *cloud*, dan *internet of things* (IoT) yang mampu membantu petani menentukan kapan waktu yang tepat untuk menanam atau memanen tanaman, meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya, dan mengembangkan ekosistem yang lebih berkelanjutan. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam aktifitas pertanian juga dapat membantu mengeksplorasi kesehatan tanah, memantau kondisi cuaca yang memungkinkan petani mengambil keputusan yang lebih baik di setiap tahap proses budidaya tanaman hingga pemasaran.

Pada pertanian yang maju, petani adalah pengusaha pertanian, sebagai pelaku agribisnis yang mandiri dan mampu mengambil keputusan atas bisnisnya.

Sulawesi Tengah sebagai wilayah Industri berbasis Sumber Daya Alam adalah: Industri berbasis SDA di Sulawesi Tengah utamanya terdiri dari: (1) pengembangan agroindustri sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah pertanian agar masyarakat di pedesaan memiliki daya saing dan memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Agroindustri merupakan kegiatan pertanian yang berorientasi permintaan pasar dan menitikberatkan pada proses kegiatan pasca panen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah hasil pertanian agar menghasilkan produk produk yang berkualitas tinggi. Agroindustri di Sulawesi Tengah mencakup berbagai hal, khususnya dalam pengelolaan hasil panen, produksi makanan dan minuman, biofarmaka, bioenergi, dan agrowisata. Pelaksanaan agroindustri di pedesaan merupakan kegiatan industri yang memanfaatkan sumber daya dalam yang dimiliki berupa hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang produk hingga memproduksi, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Kegiatan agroindustri sangat realistis karena tidak memerlukan kandungan impor yang tinggi dan lebih banyak menggunakan kandungan lokal serta dapat dilakukan melalui Usaha Kecil Menengah (UKM); (2) industrialisasi kemaritiman, kelautan dan perikanan, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu wilayah di ALKI II Selat Makassar memiliki beberapa wilayah yang langsung menjadi bagian dari Kawasan Selat Makassar. Wilayah di Kawasan Selat Makassar merupakan wilayah yang dapat langsung menunjang kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Karenanya, seluruh wilayah yang berada di Kawasan Selat Makassar memiliki peluang strategis untuk mengembangkan industrialisasi kemaritiman, kelautan dan perikanan yang diantaranya meliputi jasa angkutan laut, jasa kapal untuk penyebrangan, industri galangan kapal, industri reparasi dan perawatan kapal, industri logistik pengiriman barang melalui laut, jasa pergudangan laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, terminal peti kemas, pariwisata bahari, perikanan tangkap, perikanan budidaya, budidaya udang, usaha pengalengan dan pengepakan ikan, penggarahan berbasis ekonomi biru, dan lainnya; (3) Pariwisata di Sulawesi Tengah merupakan industri jasa yang potensial dan potensi ini dimiliki tiap wilayah. Masing-masing wilayah wajib mengembangkan pariwisata sesuai potensi yang dimiliki dan dapat didukung oleh kehadiran wisata buatan serta berbagai fasilitas yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan daya tarik pariwisata. Peningkatan pendapatan masyarakat sangat diharapkan diperoleh dari aktivitas pariwisata yang digerakkan oleh masyarakat yang telah sangat sadar wisata. (4) Pertambangan, diharapkan Sulawesi Tengah dapat menjadi pusat pengolahan hasil pertambangan dan peningkatan nilai tambah serta

hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pengembangan dan penataan Kawasan perkotaan di sekitar Kawasan industri pertambangan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Adapun perdagangan dan jasa perkotaan merupakan bagian penting dalam pergerakan perekonomian. Perkotaan yang berstandar global dan mampu menjalankan kegiatan perdagangan dan jasa perkotaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan dengan optimal. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menekankan daerah Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam, wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional. Adapun prioritas Pembangunan regional Sulawesi adalah: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM): terutama untuk mendukung peningkatan kualitas Kesehatan, Pendidikan dan ketenagakerjaan serta mendorong Pembangunan ekosistem riset dan inovasi. 2. Pembangunan ekonomi: yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada Kawasan ekowisata, Kawasan perikanan tangkap dan budidaya serta industri pengolahannya, Kawasan pertanian tanaman pangan, serta Kawasan Perkebunan kakao, kelapa dan kopi. 3. Pembangunan Saran dan Prasarana Konektivitas: untuk mendukung fungsi hub dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital. 4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi khususnya Kawasan perbatasan. 5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana ruang wilayah dengan mempertimbangkan resiko bencana serta penuntasan RDTR Kabupaten/kota untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berbudaya.

Dalam upaya mengukur pencapaian visi RPJPD Tahun 2025-2045, maka ditetapkan sasaran visi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama Visi RPJPN dan Sasaran Utama Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi RPJPN 2025-2045	Target Sasaran		Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045	Target Sasaran	
		Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045
1	Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju			1. Peningkatan Pendapatan Perkapita		
	a. GNI Perkapita (US\$)	5.500	23.000-30.300	a. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	140,14-141,2	1.191,02-1.446,61
	b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0	b. Indeks Ekono mio Biru Indonesia (IBEI)	49,15	87,54
	c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97-41,45	49,17-52,70
2	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang			2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,6-0,8	a. Tingkat Kemiskinan (%)	11,06-11,56	0,30-0,80
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,377-0,382	0,290-0,320	b. Rasio Gini (Indeks)	0,298-0,302	0,236-0,287
	c. Kontribusi PDRB KTI (%)	20,6 (2022)	28,5	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,93	3,05
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat			3. Peningkatan Kepemimpinan dan Pengaruh di Daerah yang meningkat		
	Global Power Indeks (Indeks)	34 (2023)	15 besar	Indeks Daya Saing Daerah	3,43	5
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat			4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Human Capital Indeks (Indeks)	0,54 (2022)	0,73	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,51	0,67
5	Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission			5. Penurunan Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission		
	Penurunan Intensitas Emisi GRK(%)	38,6	93,5	Penurunan Intensitas Emisi GRK(%)	77,96	96,50
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,75	88,90

Untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, maka ditempuh dengan 8 (Delapan) rangkaian Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, yaitu:



Gambar 3.8
Rumusan Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045



Gambar 3.9
Prioritas Pembangunan Sulawesi

Provinsi Sulawesi tengah melakukan pentahapan rekomendasi pada RPJMD teknokratik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, melalui arah kebijakan tranformasi sosial, ekonomi, tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepempinan, serta Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI EKONOMI TAHUN 2025-2029

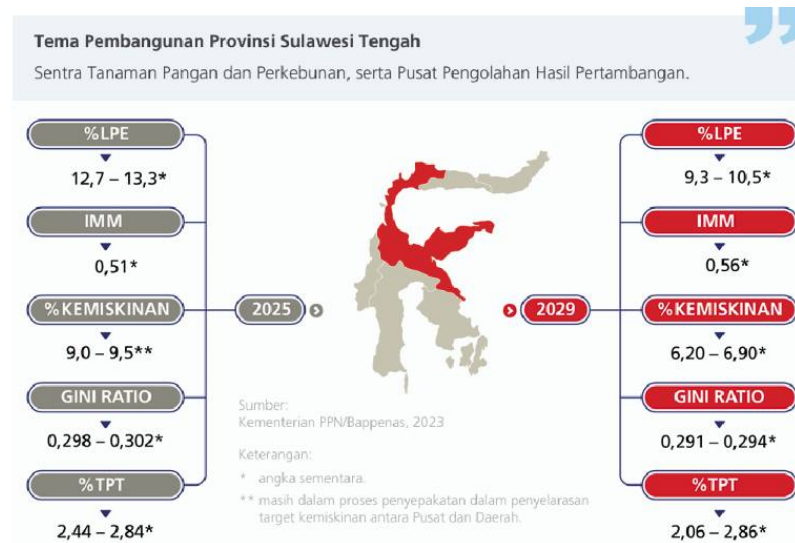
Transformasi pembangunan ekonomi diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan nilai serta meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan yang difokuskan pada industri pertambangan, Kawasan wisata, Kawasan perikanan tangkap dan budidaya industri pengolahan, Kawasan pertanian dan Perkebunan seperti kelapa dan kopi. Pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah ke depan akan menghadapi perubahan besar dimana Provinsi Sulawesi Tengah menuntut dilakukannya transformasi ekonomi. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan geoeкономи. Di samping itu, transformasi ekonomi juga merupakan kunci untuk mewujudkan Sulawesi Tengah ke luar dari jebakan daerah berpendapatan menengah (*Middle Income Trap* atau MIT). Perekonomian juga akan lebih diarahkan untuk berorientasi ekspor nilai tambah tinggi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan perekonomian menjadi lebih efisien dan produktif, sehingga memperkuat sektor-sektor

ekonomi yang potensial untuk tumbuh dan berkembang. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Sulawesi Tengah dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri berbasis sumber daya alam dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Transformasi ekonomi tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan Lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) bukan hanya untuk pemegang saham (*shareholders*). Berlandaskan berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi serta dukungan infrastruktur konektivitas yang baik akan mewujudkan konektivitas antarwilayah, memperkuat akses ke pasar regional dan global, serta mengurangi biaya logistik. Selanjutnya, pembangunan perkotaan termasuk Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan, harus menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern. IKN mendorong pembangunan Sulawesi Tengah Sentris dan menjadi contoh kota berwawasan lingkungan, aman, nyaman, dan hijau serta perlu mengadopsi konsep *smart city*, di mana layanan digital mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi. Olehnya, dirumuskan sasaran Pembangunan transformasi ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029, yang terdiri dari :

1. IPTEK inovasi dan Produktivitas Ekonomi
2. Penerapan Ekonomi Hijau
3. Transformasi Digital
4. Integrasi Ekonomi Digital
5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Arah kebijakan pengembangan wilayah provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Sulawesi Tengah emas yakni Pembangunan berbasis klaster. Pembangunan dilakukan berbasis klaster perwilayahan seperti yang tertuang dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 - 2042, yaitu: a. Klaster Perkotaan Pasigala meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi; b. Klaster Agropolitan yaitu Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara. Agropolitan Bolipamuso meliputi

Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso; Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli; c. Klaster Industri Morubang meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara; dan d. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tojo Una-Una.



Gambar 3.10
Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 3.11 Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah sebagai upaya meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Upaya ini dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tujuan penataan ruang Provinsi Sulawesi

Tengah yaitu mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis mitigasi bencana. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastuktur wilayah tersebut didapat ditempuh melalui: Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik Sulawesi Tengah. Serta Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah dengan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar yang berkualitas. Pencapaian tersebut ditandai dengan menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Tengah serta meningkatnya pelayanan dasar perumahan (air minum, sanitasi layak, rumah layak huni korban bencana, penanganan Kawasan kumuh dan ketersediaan listrik) dan pekerjaan umum (kemantapan jalan).

Upaya Provinsi Sulawesi Tengah untuk berkontribusi dalam Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui pembangunan perwilayahan yang dielaborasi dari RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, kebutuhan pembangunan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penunjang ekonomi IKN, dan upaya pengembangan Sulawesi Tengah untuk mencapai Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045. Gambar berikut memperlihatkan arah kebijakan Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045.



Gambar 3.12 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 Berdasarkan 4 Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah

Detail dari Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045 terdiri atas 3 Pilar yang merupakan satu kesatuan dalam pengembangan tiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Sulawesi Tengah sebagai Pusat Ekonomi Global KTI
2. Sulawesi Tengah sebagai Penunjang Ekonomi IKN dan Industri Berbasis SDA
3. Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Indonesia yang Hijau, Ekologis, dan Produktif

Setiap wilayah memiliki kekhususan arah pengembangan wilayahnya. Tabel-tabel berikut memperlihatkan penerapan 3 Pilar Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045 berdasarkan setiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3.2 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Palu 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA PALU 2025-2045
1	KOTA PALU Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, INDUSTRIALISASI KEMARITIMAN PERIKANAN DAN KELAUTAN, LAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PARIWISATA BERTARAF INTERNASIONAL) • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi layanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum • Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan yang kuat dan mengayomi warga • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan • Konektivitas, infrastruktur, sarana prasarana • Metropolitan PASIGALA • Produktivitas KEK PALU, Ekraf, UMKM, Korporasi Masyarakat Sertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Pusat perdagangan dan jasa global • Kerjasama riset pariwisata, kebumihan dan kebencanaan bertaraf internasional • Sekolah vokasi, pendidikan tinggi kebumihan, kebencanaan, mitigasi, dan pariwisata • Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global.
2	KOTA PALU MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Perdagangan, Industri, dan Jasa Hulu-hilir hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, industrialisasi kemaritiman, kelautan dan perikanan, hasil hutan produksi, industri berbasis SDA, layanan pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
3	KOTA PALU SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi • Pengembangan sebagai Kota Tangguh, Kota Pintar, Kota Taman Bumi (Geopark City): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan Geopark PASIGALA • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan energi terbarukan (matahari) • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kota Palu terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.3 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sigi 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN SIGI 2025-2045
1	KABUPATEN SIGI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (PERDAGANGAN DAN JASA - AGROPOLITAN KPN: AGRIBISNIS dan AGROINDUSTRI; PARIWISATA) • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi layanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum • Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Wilayah perkotaan sebagai bagian dari Metropolitan PASIGALA: Pusat Perdagangan dan jasa global • Agropolitan KPN berbasis pertanian modern: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perdagangan internasional, dan jasa lingkungan • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	KABUPATEN SIGI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA. Perdagangan dan jasa: kesehatan, pendidikan, pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan (PERKOTAAN PASIGALA); Produksi: Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, hutan produksi, pariwisata (Agropolitan KPN).
3	KABUPATEN SIGI SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan sebagai kota dan wilayah yang tangguh, Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan rencana <i>Geopark</i> PASIGALA; Penanganan eks area bencana • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA. • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan Kebun Raya Sigi • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.4 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Donggala 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN DONGGALA 2025-2045
1	KABUPATEN DONGGALA Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (PERDAGANGAN DAN JASA, AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI DAN PARIWISATA). • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kota Donggala sebagai bagian dari Metropolitan PASIGALA: Perdagangan dan jasa global • Kawasan Agropolitan dan KPN berbasis pertanian modern: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • Produktivitas: EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset komoditas kelapa dan kakao, perdagangan internasional, jasa lingkungan, investasi dan pengembangan agropolitan Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata Kabupaten Donggala terkoneksi dengan layanan pariwisata PASIGALA • Pengelolaan untuk kerja sama lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Pasar tematik dan ruang-ruang publik yang representatif di tiap kecamatan.
2	KABUPATEN DONGGALA MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA. Perdagangan dan Jasa : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industrialisasi kemaritiman, perikanan dan kelautan. Hasil hutan produksi, layanan pendidikan, kesehatan, dan pariwisata (Perkotaan PASIGALA); Produksi: Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat hutan produksi, layanan pariwisata (Agropolitan KPN).
	KABUPATEN DONGGALA SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN DONGGALA 2025-2045
3	YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi • Pengembangan sebagai kota dan wilayah yang tangguh; Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan rencana <i>Geopark</i> PASIGALA; Penanganan eks area bencana • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Peremajaan pohon kelapa di wilayah pesisir • Penataan dan pengelolaan kawasan wisata: Kota Tua Donggala, <i>Sunset City</i> • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.5 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Buol 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BUOL 2025-2045
1	KABUPATEN BUOL Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi agribisnis pertanian, perikanan, peternakan) • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian modern: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan, perkebunan • Sekolah vokasi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	KABUPATEN BUOL MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai produk : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, dan layanan pariwisata.
3	KABUPATEN BUOL SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura). Pengembangan Kebun Raya Buol • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.6 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tolitoli 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI 2025-2045
1	KABUPATEN TOLITOLI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi agribisnis pertanian, agroindustri) • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan, perkebunan • Sekolah vokasi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	KABUPATEN TOLITOLI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai produk : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hasil hutan produksi, dan layanan pariwisata.
3	KABUPATEN TOLITOLI SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan agrowisata dan agroindustri cengkeh • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.7 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Parigi Moutong 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 2025-2045
1	KABUPATEN PARIGI MOUTONG Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI: AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi pertanian dan agribisnis. • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan • Sekolah vokasi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	KABUPATEN PARIGI MOUTONG MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai produk : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industrialisasi

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 2025-2045
	kemaritiman, perikanan dan kelautan, hasil hutan produksi, dan layanan pariwisata.
3	KABUPATEN PARIGI MOUTONG SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan Wisata Pertanian Tanaman Pangan dan Agrowisata Durian • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.8 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Poso 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN POSO 2025-2045
1	KABUPATEN POSO Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI: AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi pertanian, agribisnis, dan agroindustri • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan. Sekolah vokasi pertanian, agribisnis dan agroindustri • Riset pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	KABUPATEN POSO MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA: Produk : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hasil hutan produksi, dan layanan pariwisata.
3	KABUPATEN POSO SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Pengembangan Negeri 1000 Megalit dan Geopark Danau Poso • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan Wisata Tanaman Hortikultura Lembah Napu dan Sekitarnya • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.9 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Morowali 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MOROWALI 2025-2045
1	KABUPATEN MOROWALI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (INDUSTRI, PARIWISATA, SEKOLAH VOKASI DAN PENDIDIKAN TINGGI PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan Kawasan industri berkelanjutan: • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset pertambangan dan industri berkelanjutan • Riset dan pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi pertambangan dan industri • Layanan jasa pariwisata MORUBANG.
2	KABUPATEN MOROWALI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA
	Produk : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG
3	KABUPATEN MOROWALI SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF
	• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi MORUBANG-BALATOJU • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.10 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Morowali Utara 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 2025-2045
1	KABUPATEN MOROWALI UTARA Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (INDUSTRI, PARIWISATA, SEKOLAH VOKASI DAN PENDIDIKAN TINGGI INDUSTRI)
	• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan Kawasan industri berkelanjutan: • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset pertambangan

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 2025-2045
	dan industri berkelanjutan Riset dan pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi industri • Layanan jasa pariwisata MORUBANG berkelanjutan
2	KABUPATEN MOROWALI UTARA MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Produk : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG
3	KABUPATEN MOROWALI UTARA SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang • Pengembangan dan Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.11 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Banggai 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI 2025-2045
1	KABUPATEN BANGGAI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (MORUBANG: Industri, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan; BALATOJU: Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan) • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan Kawasan industri berkelanjutan: • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektivitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset industri, perikanan
	dan kelautan, dan lingkungan • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi lingkungan, kelautan dan perikanan • Layanan jasa pariwisata MORUBANG-BALATOJU.
2	KABUPATEN BANGGAI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Produk : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG-BALATOJU.
3	KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang di Klaster Industri MORUBANG • Pengembangan Kawasan Minapolitan yang Produktif dan Ekologis di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi MORUBANG-BALATOJU • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.12 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2025-2045
1	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN, SEKOLAH VOKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN, ARSITEKTUR MARITIM) • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. Pengembangan Kawasan Minapolitan Agribisnis hulu dan hilir produk kelautan dan perikanan Pengembangan UMKM, EKRAF, dan Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Minapolitan • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset ekonomi biru dan bioekonomi • Sekolah vokasi perikanan dan kelautan • Layanan jasa pariwisata Banggai Kepulauan terintegrasi dengan pariwisata BALATOJU
2	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Produk : Hasil perikanan dan kelautan; layanan pariwisata terintegrasi dengan pariwisata pada Klaster BALATOJU
3	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi biru dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan Kota Hijau, Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis • Pengembangan arsitektur lokal bernuansa maritim yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.13 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Banggai Laut 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI LAUT 2025-2045
1	KABUPATEN BANGGAI LAUT Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN, SEKOLAH VOKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN, ARSITEKTUR MARITIM) • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. Pengembangan Kawasan Minapolitan Agribisnis hulu dan hilir produk kelautan dan perikanan Pengembangan • UMKM, EKRAF, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan 66awasan66a dan 66awasan66an taraf internasional • Riset ekonomi biru dan bioekonomi • Sekolah vokasi perikanan dan kelautan • Layanan jasa pariwisata Banggai Laut terintegrasi dengan pariwisata BALATOJU

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI LAUT 2025-2045
2	KABUPATEN BANGGAI LAUT MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA. Produk : Hasil perikanan dan kelautan; layanan pariwisata terintegrasi dengan pariwisata pada Klaster BALATOJU.
3	KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi biru dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan Kota Hijau; Kawasan Minapolitan yang Produktif dan Ekologis; Pengembangan arsitektur lokal bernuansa maritim Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi 67awasa ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas 67awasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 3.14 Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Tojo Una-Una 2025-2045

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA 2025-2045
1	KABUPATEN TOJO UNA-UNA Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN, SEKOLAH VOKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN, ARSITEKTUR MARITIM) • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. Pengembangan Kawasan Minapolitan Agribisnis hulu dan hilir produk kelautan dan perikanan Pengembangan • UMKM, EKRAF, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset ekonomi biru dan bioekonomi • Sekolah vokasi perikanan dan kelautan • Layanan jasa pariwisata Tojo Una-Una terintegrasi dengan pariwisata BALATOJU.
2	KABUPATEN TOJO UNA-UNA MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Produk : Hasil perikanan dan kelautan; layanan pariwisata terintegrasi dengan pariwisata pada Klaster BALATOJU.
3	KABUPATEN TOJO UNA-UNA SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF • Penerapan ekonomi biru dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan Kota Hijau; Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis • Pengembangan arsitektur lokal bernuansa maritim yang unik, fungsional, atraktif, dan menarik wisatawan • Pengembangan Kepulauan Togean sebagai destinasi wisata super prioritas nasional yang ramah lingkungan • Pengembangan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja adalah untuk memfokuskan arah perencanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya agar terjadi sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah: Sesuai IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah dapat dilihat pada tabel dibawah;

Tabel 3.15 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2026
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan	103,93
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	73,4
Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,1884
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	87,98

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 diarahkan sesuai dengan Kebijakan Pusat, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026, dimana terdapat beberapa program yang diharapkan dapat menjadi unggulan Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang. Pengembangan komoditas kelautan dan perikanan terbagi atas (A) Komoditas Industrialisasi: (1) Rumput Laut : (a) *Euchema cottonii*, (b) *Gracillaria sp*, (2) Tuna Tongkol Cakalang, (3) Udang, (4) Ikan Demersal, (5) Sidat dan (B) Komoditas Ketahanan Pangan antara lain (1) Lele, (2) Nila, (3) Mas, (4) Pelagis Kecil.

Berikut Rencana Pengembangan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tengah:

A. Pengembangan Rumput Laut

Potensi areal budidaya rumput laut sebesar 540.012 Ha, sedang lahan tambak sebesar 42.095 Ha dimana pada tahun 2023 produksi rumput laut adalah sebesar 695.560,96 ton. Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema Cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria sp* yang diusahakan pada budidaya tambak.

Guna mendukung pengembangan rumput laut di Sulawesi Tengah, dilakukan upaya pengembangan Rumput Laut Teknologi Kultur Jaringan di Sulawesi Tengah dimana permasalahan rumput laut di Sulawesi Tengah yaitu (1) Tingginya fluktuasi harga sehingga belum menjadi usaha pokok; (2) Rendahnya produktifitas dan mutu rumput laut, karena masih menggantungkan bibit yang diperoleh secara vegetatif dari kawasan budidaya sekitarnya; (3) Jumlah kebun bibit yang terbatas; (4) Belum diproduksi dengan cara modern melalui kebun bibit yang asal induknya hasil kultur jaringan; (5) Penyediaan bibit dipengaruhi musim; dan (6) Perbanyakan bibit secara vegetatif terus menerus menyebabkan pertumbuhan lambat, mudah terkena penyakit serta kandungan karaginan rendah. Metode ini dipilih karena dapat memproduksi bibit rumput laut dalam

skala besar. Tidak dipengaruhi musim karena dilakukan di laboratorium, bibit yang dihasilkan memiliki sifat yang identik dengan induknya, tidak memerlukan tempat yang luas dan kesehatan dan mutu bibit yang dihasilkan lebih terjamin.

B. Pengembangan Tuna, Tongkol dan Cakalang dan Pelagis Kecil

Industrialisasi Tuna, Tongkol, Cakalang dan Pelagis Kecil Dilakukan dalam mendukung peningkatan devisa dan ketahanan pangan nasional, dilakukan melalui perkuatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Produksi Tuna, Tongkol dan Cakalang tahun 2023 sebesar 84.364,3 ton; sedangkan pelagis kecil = 117.825,5 ton. Strategis yang dapat dilakukan sebagai berikut: (1) peningkatan SDM pelaku usaha penguasaan IPTEK; (2) penataan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pangkalan pendaratan ikan (PPI); (3) rencana pengembangan karamba tuna; (4) pengembangan infrastruktur kepelabuhanan pada lokasi pelabuhan provinsi yang masuk pada RIPPAN (Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional); (5) pemberdayaan nelayan skala 3-10 GT untuk Tuna/Cakalang; (6) pengembangan industri pengolahan (*processing and canning*) berbasis *zero waste*; (7) pengembangan industri penunjang (kapal fiberglass; dan alat tangkap ikan).

C. Pengembangan Udang

Potensi lahan tambak berkisar 54.812 Ha; namun pemanfaatannya baru sekitar 28,32%. Produksi udang tahun 2023 sebanyak 26.683,75 ton, didominasi Udang Windu (*P. Monodon*) dari tambak rakyat. Kawasan pertambakan di Sulawesi Tengah mempunyai ciri khas: (a) tidak berada dalam satu kawasan luas; namun berkisar 100-200 Ha; (b) jarak antar kawasan relatif jauh, berkisar 3-5 km; (c) sumberdaya air yang masih alami. Kondisi ini sangat ideal untuk pertambakan supra intensif; mengingat kecilnya potensi penyebaran penyakit secara horisontal. Strategis Industrialisasi sebagai berikut: (1) peningkatan SDM dan penguasaan IPTEK pelaku usaha; (2) pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan; (3) pengembangan tambak rakyat dengan komoditas Udang Windu, serta polikultur dengan bandeng dan *Gracilaria sp* melalui: (a) penguatan BBU dan produksi benih unggul; (b) revitalisasi konstruksi dan saluran tambak, (c) stimulan permodalan kerja, (d) pendampingan teknis budidaya; dan (4) Pengembangan Tambak Supra Intensif dengan komoditas Udang Vaname (*L. Vannamei*) melalui: (a) penggunaa teknologi yang efisien ramah lingkungan dan (b) tax holiday bagi pengembangan investasi.

D. Pengembangan Ikan Demersal

Produksi Ikan Demersal didominasi oleh *Red Snapper*, *Baramundi*, *Grouper*, *Giant Seaperch*, *Yellowtail Fusilier*, *Black and Silver Pomfret* dan *Goat-Fist*. Produksi tahun 2023 sebesar 102.051,30 ton. Pasar Ikan Demersal, terutama Kerapu Hidup adalah Jepang, Singapura, Hongkong, Cina dan Taiwan sedangkan bentuk frozen dikirim ke Eropa dan Amerika. Pabrik-pabrik Pengolahan (*Processing Plant*) berorientasi ekspor umumnya berada di daerah kabupaten Banggai. Pengembangan Ikan Demersal akan diintegrasikan dengan *Sea Ranching* berbasis Rumah Ikan (*Fish Home*). *Fish Home* adalah terumbu karang buatan (*artificial reef*), berfungsi sebagai: (a) alat pengumpul; (b) tempat reproduksi ikan, serta (c) rehabilitasi ekosistem laut. Tujuan pembangunan *Fish Home* sebagai upaya konservasi, produksi; dan secara tidak langsung menjaga ketersediaan *food chain* bagi Tuna dan pelagis besar. *Sea Ranching* merupakan kegiatan terintegrasi antara bidang perikanan tangkap, budidaya, kelautan dan pengawasan. Strategi Industrialisasi sebagai berikut: (1) Peningkatan SDM untuk penguasaan IPTEK, (2) Penyiapan ekosistem berupa pembangunan *Fish Home*, (3) penyiapan kelembagaan masyarakat; (4) restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada

kawasan *Fish Home*; (5) penyiapan aturan main pengolahan kawasan dan (6) peningkatan peran swasta khususnya eksportir ikan demersal dalam tata kelola *Fish Home*.

E. Pengembangan Ikan Air Tawar

Pengembangan ikan air tawar lebih diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan konsumsi akan. Produksi tahun 2023 produksi nila, mas dan lele mengalami kenaikan menjadi 4.450,23 ton dari tahun 2022 sebesar 1.918,249 ton. Strategis Industrialisasi sebagai berikut: (1) Pengembangan BBI dan Sentral Budidaya Ikan Air Tawar pada kolam, tambak marginal, Perairan Umum Daratan serta disekitar kawasan perkebunan dan pertambangan, fokus pada ikan mas, dan nila; (2) kerjasama pengembangan Budidaya Ikan Hemat Air dengan penggunaan bioflok; fokus pada ikan lele, nila, dan mas; (3) Kampanye GEMARIKAN dan diversifikasi produk perikanan.

3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2025 dan Rencana 2026

Tabel 3.16 Pendanaan Program dan Kegiatan 2025 dan Rencana 2026

No	Program dan Kegiatan	2025	2026
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.940.812.558	38.971.074.354
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	686.300.000	2.708.481.476
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.539.223.605	26.560.186.600
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	134.585.000	100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	923.294.187	2.849.690.071
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		551.386.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		750.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.995.956	2.215.108.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.413.810	3.236.222.107
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU	6.140.838.575	4.803.619.977
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6.140.838.575	2.733.803.000
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	219.535.000	440.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	236.055.900	1.629.816.977
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	33.984.963.700	32.578.681.780
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	7.812.839.700	22.889.874.021
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		461.801.036
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	172.124.000	164.166.360
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	26.000.000.000	9.062.840.363
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.540.594.642	7.422.648.706
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		40.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		40.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.612.740.500	4.442.648.706
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	10.927.854.142	2.900.000.000

No	Program dan Kegiatan	2025	2026
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.428.040.900	8.057.259.972
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	7.312.258.900	7.922.259.972
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	115.782.000	135.000.000
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.558.726.685	2.706.657.386
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	147.696.000	179.001.387
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	829.180.000	638.399.169
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	581.850.685	1.889.256.830
	UPTD. Balai Perbenihan Perikanan	2.070.000.000	5.969.191.380
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.330.854.000	4.119.191.380
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.800.000	1.754.460.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.953.880	270.144.880
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.580.120	1.864.586.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.520.000	200.000.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	539.146.000	1.850.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		100.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	539.146.000	1.750.000.000
	UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan	899.993.136	2.296.535.420
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	615.186.324	1.496.535.420
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.100.000	481.032.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.723.590	82.851.120
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.823.034	772.652.300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.539.700	130.000.000
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	284.806.812	800.000.000
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	284.806.812	800.000.000
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I	1.440.000.000	3.650.482.520
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.209.717.400	2.610.482.520
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.128.600	300.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.273.500	225.691.520
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.305.300	1.704.036.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.010.000	350.755.000
12	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	51.805.400	410.000.000
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	51.805.400	410.000.000

No	Program dan Kegiatan	2025	2026
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	178.477.200	630.000.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	178.477.200	630.000.000
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II	1.440.000.000	3.304.702.222
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.213.347.850	2.114.702.222
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.810.000	209.444.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.848.650	590.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.011.832	849.099.750
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.677.368	436.158.472
15	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	108.075.750	460.000.000
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	108.075.750	460.000.000
16	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	118.576.400	730.000.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	118.576.400	730.000.000
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III	1.170.000.284	3.584.287.950
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.015.355.484	2.594.287.950
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.640.000	475.530.685
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.806.678	410.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.604.256	1.257.286.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.304.550	421.470.765
18	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	37.656.800	460.000.000
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	37.656.800	460.000.000
19	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	116.988.000	530.000.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	116.988.000	530.000.000
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV	830.923.335	2.414.113.723
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	520.531.335	1.374.113.723
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.610.000	227.123.800
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.563.975	184.838.814
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.695.360	683.122.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.662.000	249.029.109
21	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	73.629.500	410.000.000
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	73.629.500	410.000.000
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	236.762.500	630.000.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	236.762.500	630.000.000

No	Program dan Kegiatan	2025	2026
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V	1.125.000.000	1.955.483.814
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.086.300.000	1.126.434.564
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.760.000	100.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.800.000	290.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.290.000	379.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.450.000	306.934.564
24	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	20.760.000	549.049.250
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	20.760.000	549.049.250
25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	17.940.000	280.000.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	17.940.000	280.000.000
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI	1.020.000.000	1.150.000.000
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	795.616.000	670.950.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.550.000	50.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		34.548.750
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.001.390	90.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.424.610	366.522.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.640.000	129.880.000
27	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	135.948.000	249.049.250
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	135.948.000	249.049.250
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	88.436.000	230.000.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	88.436.000	230.000.000
	UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII	450.000.000	1.151.000.000
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.000.000	481.950.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		34.548.750
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.200.000	150.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.800.000	217.522.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000	29.880.000
30	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	100.000.000	439.049.250
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100.000.000	439.049.250
31	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	100.000.000	230.000.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	100.000.000	230.000.000
		90.593.977.060	120.015.739.204

3.5 FOKUS UTAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, terdapat perubahan struktur UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dimana awalnya berjumlah 10 UPTD menjadi 9 (sembilan) UPTD, sebagai berikut :

1. UPTD Balai Perbenihan Perikanan Kelas A;
2. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
3. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I Kelas A;
4. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II Kelas A;
5. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III Kelas A;
6. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV Kelas A;
7. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V Kelas A;
8. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI Kelas A; dan
9. UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII Kelas A

3.5.1 Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pengelolaan administrasi program, keuangan, asset, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja. pengelolaan administrasi keuangan. asset. kepegawaian dan umum; (b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja. pengelolaan administrasi keuangan. asset. kepegawaian dan umum; (c) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan. asset. kepegawaian. rumah tangga dan umum; (d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan. asset. kepegawaian. rumah tangga dan umum; (e) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan. asset. kepegawaian. rumah tangga dan umum; (f) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Fokus pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat pada tahun anggaran 2026 adalah diarahkan pada Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi dimana mencakup Penataan kepegawaian, Peningkatan SDM Teknis, Penataan lingkungan kantor, Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan, Pelaporan keuangan berbasis akrual dan sinkronisasi asset, Pengusulan kembali terkait ISO 9001:2015 serta dukungan kepada kegiatan-kegiatan administrasi keuangan.

3.5.2 Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; dan (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap pada tahun anggaran 2026 difokuskan pada : (a) penyediaan dan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan dimana terdapat beberapa pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan dan direhabilitasi antara lain: Pengembangan PPI PPI Mato dan Pelabuhan Perikanan Lafeu melalui Dana DAK dimana diusulkan pembangunan penahan gelombang, turap penahan tanah, dermaga, kolam pelabuhan, drainase, TPI Hiegenis, Fasilitas Air (tawar) Bersih, Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo), Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Peralatan dan Mesin Penunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur; (b) pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui perbaikan sistem data serta kegiatan restocking pada Perairan Umum Daratan (PUD) di Poso, Toli-toli, Parigi Moutong, Sigi dan Morowali; (c) Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap termasuk dalam rangka pengentasan kemiskinan di 12 kabupaten/kota, mengatasi rawan pangan melalui inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU) dan peningkatan produktifitas perikanan tangkap antara lain melalui Program *Smart Fishing* dan bantuan sarana prasarana bagi kelompok nelayan; (d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perikanan tangkap; (e) koordinasi dengan stakeholder terkait permasalahan perikanan tangkap (antara lain : ketersediaan BBM, kondisi cuaca, perijinan dan Penangkapan Ikan Terukur); (f) pelayanan kepelabuhanan; (g) Sosialisasi SeHAT Nelayan; (h) Bimtek SIMKADA; dan (i) dukungan administrasi pelaksanaan program kegiatan perikanan tangkap. Sampai dengan tahun 2026 ditargetkan sebanyak 8% nelayan

miskin (Data P3KE) dapat dibantu melalui program pengentasan kemiskinan.

3.5.3 Perikanan Budidaya dan P2HP

Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP bertugas membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan fungsi pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan fungsi: (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan dan pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pengembangan Usaha Budidaya, Logistik Hasil Perikanan dan pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP.

Fokus kegiatan bidang perikanan budidaya dan P2HP tahun 2026 adalah (1) pengelolaan dan pemuktahiran basis data kegiatan pembudidayaan, logistik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, termasuk didalamnya kegiatan perijinan; (2) Pengembangan Rumput Laut Kultur Jaringan dalam rangka peningkatan produksi dan kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan; (3) Pengembangan budidaya ikan air tawar melalui inovasi-inovasi, antara lain melalui penerapan bioflok dan biotren (bioflok masuk pesantren) yang juga dilakukan dalam rangka pengendalian Schistosomiasis di Kabupaten Poso dan Sigi; (4) Program Bantuan Sarana Produksi Perikanan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas; (5) Dukungan Peningkatan Infrastruktur UPT Perbenihan; (6) Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Kesehatan Ikan; (7) Peningkatan Kapasitas Pokdakan Budidaya melalui CBIB dan CPIB; (8) Dukungan Keamanan Pangan Hasil Perikanan; (9) Penguatan Kelembagaan Poklahsar sera Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan melalui bantuan sosial dan rehab ruang pengolahan PMHP; (10) Penyediaan sarana CCS Pendukung Produksi, antara lain dengan Penyediaan ice storage pada PPI Paranggi dan PPI

Mato; (11) Peningkatan Fasilitas SKP dan Ekspor Hasil Perikanan; (13) Kampanye Gemarikan dalam rangka penurunan stunting dan (14) Dukungan bagi Program Pengentasan Stunting dan Penurunan Daerah Rawan Pangan.

3.5.4 Pengelolaan Ruang Laut

Tugas bidang pengelolaan ruang laut adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; dengan fungsi: (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang laut dan Konservasi Ruang Laut; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

Rencana fokus kegiatan tahun 2026 adalah (a) Sosialisasi Perda terkait Bidang Kelautan; (b) Inventarisasi Data Existing Pemanfaatan RL; (c) Kegiatan Pengelolaan RL sampai dengan 12 Mil; (d) Rehab Terumbu Karang dan Penanaman mangrove; (e) Pengadaan sarana prasarana penanganan sampah laut (f) Pemetaan Sebaran Ekosistem Terumbu Karang dan Mangrove; (g) Fasilitasi Perijinan termasuk verifikasi lapangan terkait Perijinan; (h) Survey Kondisi Existing Pemanfaatan RL; (i) Sosialisasi Sistem Kadaster Laut dalam Pemanfaatan RL; (j) Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir serta pelibatan dan penguatan kelembagaan diantaranya melalui Pelatihan terkait Bulan Cinta Laut bagi Masyarakat Pesisir; (k) Penanganan Pencemaran di wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan-kegiatan inovasi; (l) Monitoring biofisik dan sosek kawasan konservasi; dan (m) Pemberdayaan dan Fasilitasi kelembagaan kelompok masyarakat pesisir.

3.5.5 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tugas bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis. dan monitoring. evaluasi

dan pelaporan terhadap menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP dan Penanganan Pelanggaran dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut. Pengawasan Perikanan Budidaya. P2HP. dan Penanganan Pelanggaran; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Rencana fokus kegiatan tahun 2026 bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah (a) pelaksanaan gelar operasi; (b) pembinaan kelompok masyarakat pengawas; (c) rehabilitasi sarana prasarana pengawasan; serta (d) peningkatan SDM Pengawas.

3.5.6 UPTD Balai Perbenihan Perikanan

UPT Perbenihan Perikanan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas. di bidang Perbenihan Perikanan dengan fungsi : (a) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Perbenihan Perikanan; (b) Melaksanakan pelayanan dan pengkajian teknologi dibidang Perbenihan dan Budidaya Perikanan; (c) Melaksanakan tugas teknis operasional/penunjang dinas di bidang Perbenihan perikanan; (d) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana Perbenihan perikanan; dan (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fokus kegiatan UPT Perbenihan Perikanan tahun 2026 adalah (1) perikanan tawar fokus pada komoditas ketahanan pangan: (a) Mas (b) Nila dan (c) Lele dengan cara perbaikan mutu induk dan benih antara lain melalui perbanyak induk ikan air tawar, teknologi produksi massal benih di BBIS Tulo, Kalawara, Tonusu, Wuasa, Palolo dan penerapan teknologi budidaya di unit perbenihan; (2) perikanan payau pada komoditas udang vanname dengan: peningkatan kualitas benih dan produksi udang vaname pada Instalasi Mamboro, BBIP Kampal dan Tambak Tindaki serta peningkatan kapasitas SDM Teknis; serta (3) pengembangan inovasi-inovasi.

3.5.7 UPTD PMHP

Mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (2) Pelaksanaan Tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (3) Pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (4) Melaksanakan Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, pendayagunaan dan Pengawasan dan Pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fokus kegiatan UPTD PMHP tahun 2026 adalah (a) Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standar; (b) Pembinaan penerapan GMP dan SSOP bagi “Poklahsar”; (c) Monitoring penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan; (d) Penerapan mutu dan bimtek yang memenuhi SNI; (e) inovasi pengolahan produk hasil perikanan; dan (f) peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

3.5.8 UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I - VII

- 1) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I; dengan wilayah kerja meliputi PPI Donggala dan Kawasan Konservasi Kabupaten Donggala;
- 2) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II; dengan wilayah kerja meliputi PPI Paranggi dan Kawasan Konservasi Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-una;
- 3) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III; dengan wilayah kerja meliputi PPI Pagimana dan Kawasan Konservasi Kabupaten Banggai;
- 4) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV; dengan wilayah kerja meliputi PPI Kolonedale dan Kawasan Konservasi Kabupaten Morowali Utara;
- 5) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V; dengan wilayah kerja meliputi PPP Ogotua dan Kawasan Konservasi Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol;
- 6) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI; dengan wilayah kerja meliputi PPI Mato dan Kawasan Konservasi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut
- 7) UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII; dengan wilayah kerja meliputi PPI Lafeu dan Kawasan Konservasi Kabupaten Morowali;

Fokus kegiatan tahun 2026 UPT Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah adalah:

- Peningkatan SDM Aparatur
- Peningkatan kualitas data kepelabuhanan dan konservasi
- Peningkatan pelayanan kepelabuhanan
- Dukungan operasional dan administrasi pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi
- Pemeliharaan sarana dan prasarana serta infrastruktur Pelabuhan Perikanan Donggala, Ogotua, Paranggi, Kolonedale, Pagimana, Salakan dan Mato
- Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi
- Pengembangan inovasi

BAB IV PENUTUP

Pembangunan Kelautan dan Perikanan belakangan ini mendapat perhatian yang cukup besar baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan antara lain: (1) terbatasnya BBM bersubsidi, pupuk, pakan dan benih berkualitas (2) kelistrikan; (3) moda transportasi; (4) prasarana jalan; (5) lemahnya SDM perikanan; (6) terbatasnya sarana produksi perikanan; (7) penurunan kualitas lingkungan; (8) masih terbatasnya anggaran yang mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun dengan stakeholder terkait dimana sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas.

Akhirnya, keberhasilan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan tidak terlepas dari sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin penyelenggara/aparat serta peran aktif masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mensukseskan tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan/program untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Demikian pula indikator dan target kinerja dapat dipahami secara utuh yang pada akhirnya segenap kemampuan yang ada dapat diarahkan untuk peningkatan secara keseluruhan.

LAMPIRAN

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023-2024 dan Prakiraan 2027-2028

[illegible]

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode / Tahun : 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	70 Nilai	38.971.074.354	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Palu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	70 Nilai	38.971.074.354	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	2.708.481.476	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	2.708.481.476	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	1.260.000.076	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	1.260.000.076	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.248.481.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.248.481.400	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	100.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	100.000.000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	97 % 75 %	26.560.186.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	97 % 75 %	26.560.186.600	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214 Orang/ Bulan	24.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214 Orang/ Bulan	24.000.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.238.130.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.238.130.600	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	118.368.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	118.368.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	131.220.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	131.220.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	72.468.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	72.468.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	100.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	100.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	100 Nilai 88 Nilai	551.386.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	100 Nilai 88 Nilai	551.386.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	214 Paket	263.992.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	214 Paket	263.992.500	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	214 Orang	187.393.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	214 Orang	187.393.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah Nilai Pengukuran implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah Persentase tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	75 Nilai 75 Nilai 75 Nilai 100 %	2.849.690.071	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah Nilai Pengukuran implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah Persentase tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	75 Nilai 75 Nilai 75 Nilai 100 %	2.849.690.071	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.860.854.902	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.860.854.902	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	361.332.919	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	361.332.919	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	427.502.250	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	427.502.250	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	100 Nilai	750.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	100 Nilai	750.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	750.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	750.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	90 Nilai 100 Nilai	2.215.108.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	90 Nilai 100 Nilai	2.215.108.100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	243.348.300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	243.348.300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	823.622.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	823.622.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.148.137.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.148.137.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	3.236.222.107	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	3.236.222.107	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	1.559.879.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	1.559.879.100	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	655.014.420	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	655.014.420	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	1.021.328.587	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	1.021.328.587	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	12 kab/1 kota	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	19 %	4.803.619.977	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	12 kab/1 kota	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	19 %	4.803.619.977	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	72574893 Ha	2.733.803.000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	72574893 Ha	2.733.803.000	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	722514 Ha	1.433.803.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	722514 Ha	1.433.803.000	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	323445 Ha	1.000.000.000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	323445 Ha	1.000.000.000	
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	100 Orang	300.000.000	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	100 Orang	300.000.000	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi	100 %	440.000.000	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi	100 %	440.000.000	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang	Rekomendasi	250.000.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang	Rekomendasi	250.000.000	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	190.000.000	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	190.000.000	
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	100 %	1.629.816.977	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	100 %	1.629.816.977	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang	529.816.977	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang	529.816.977	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 Kelompok	450.000.000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 Kelompok	450.000.000	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	270 orang	150.000.000	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	270 orang	150.000.000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	400.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	400.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/1 kota	Nilai Tukar Nelayan	105 Nilai	32.578.681.780	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/1 kota	Nilai Tukar Nelayan	105 Nilai	32.578.681.780	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan Tangkap	54212,95 Ton	22.889.874.021	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan Tangkap	54212,95 Ton	22.889.874.021	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	944.068.615	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	944.068.615	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	1 Unit	178.632.820	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	1 Unit	178.632.820	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	280 Unit	21.767.172.586	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	280 Unit	21.767.172.586	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Produksi Perikanan PUD (ton)	3029,56 Ton	461.801.036	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Produksi Perikanan PUD (ton)	3029,56 Ton	461.801.036	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5 Dokumen	361.801.036	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5 Dokumen	361.801.036	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	2 Unit	100.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	2 Unit	100.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi	100 %	164.166.360	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi	100 %	164.166.360	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen	164.166.360	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen	164.166.360	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan	65 %	9.062.840.363	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan	65 %	9.062.840.363	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	9.062.840.363	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	9.062.840.363	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/1 kota	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	102,53 Nilai	7.422.648.706	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/1 kota	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	102,53 Nilai	7.422.648.706	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi	100 %	40.000.000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi	100 %	40.000.000	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	40.000.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	40.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi	100 %	40.000.000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi	100 %	40.000.000	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	40.000.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	40.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi budidaya ikan di laut	24090,92 Ton	4.442.648.706	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi budidaya ikan di laut	24090,92 Ton	4.442.648.706	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	450.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	450.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	120 Unit	3.492.648.706	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	120 Unit	3.492.648.706	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	380.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	380.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi budidaya ikan di darat	92135,88 Ton	2.900.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi budidaya ikan di darat	92135,88 Ton	2.900.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	142 Unit	2.000.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	142 Unit	2.000.000.000	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	900.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	900.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/1 kota	Persentase pelaku usaha yang diawasi	100 %	8.057.259.972	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/1 kota	Persentase pelaku usaha yang diawasi	100 %	8.057.259.972	
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Persentase pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	100 %	7.922.259.972	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Persentase pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	100 %	7.922.259.972	
	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi		Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara	50.000.000	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi		Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara	50.000.000	
	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	35 Perkara	594.143.530	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	35 Perkara	594.143.530	
	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	1 Orang	50.000.000	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	1 Orang	50.000.000	
	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	60 Hari Operasi	150.000.000	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	60 Hari Operasi	150.000.000	
	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	1 Unit	2.500.000.000	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	1 Unit	2.500.000.000	
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha	500.000.000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha	500.000.000	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	400 Pelaku Usaha	1.500.000.000	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	400 Pelaku Usaha	1.500.000.000	
	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	1 Unit	350.000.000	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	1 Unit	350.000.000	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha	1.298.116.442	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha	1.298.116.442	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	60 Kelompok Masyarakat	900.000.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	60 Kelompok Masyarakat	900.000.000	
	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah		Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum	30.000.000	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah		Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum	30.000.000	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase pelaku usaha yang diawasi	100 %	135.000.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase pelaku usaha yang diawasi	100 %	135.000.000	
	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	135.000.000	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	135.000.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/1 kota	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi	234383,76 Ton	2.706.657.386	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/1 kota	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi	234383,76 Ton	2.706.657.386	
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi	100 %	179.001.387	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi	100 %	179.001.387	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	109.001.387	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	109.001.387	
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	1 Rekomendasi	70.000.000	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	1 Rekomendasi	70.000.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Persentase Unit Pengolah Ikan (UPI) yang tersertifikasi	60 %	638.399.169	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Persentase Unit Pengolah Ikan (UPI) yang tersertifikasi	60 %	638.399.169	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	638.399.169	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	638.399.169	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0,7 Nilai	1.889.256.830	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0,7 Nilai	1.889.256.830	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	145.216.000	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	145.216.000	
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	8 Unit Usaha	1.544.040.830	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	8 Unit Usaha	1.544.040.830	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir		Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	200.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir		Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	200.000.000	
2	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				5.969.191.380	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				5.969.191.380	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. SIGI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	4.119.191.380	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. SIGI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	4.119.191.380	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	1.754.460.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	1.754.460.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.754.460.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.754.460.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	270.144.880	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	270.144.880	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	270.144.880	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	270.144.880	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.864.586.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.864.586.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	787.286.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	787.286.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.077.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.077.300.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	200.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	200.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	200.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kota Palu	Target Pendapatan Asli Daerah	1625500 Rp (1000)	1.850.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kota Palu	Target Pendapatan Asli Daerah	1625500 Rp (1000)	1.850.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi benih Produksi ikan	10 kg 100 Kg	100.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi benih Produksi ikan	10 kg 100 Kg	100.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	50.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	50.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	50.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	50.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi benih Produksi ikan	1,5 juta ekor 12500 Kg	1.750.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi benih Produksi ikan	1,5 juta ekor 12500 Kg	1.750.000.000	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	450.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	450.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	1.300.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	1.300.000.000	
3	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				2.296.535.420	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				2.296.535.420	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PALU	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	1.496.535.420	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PALU	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	1.496.535.420	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	481.032.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	481.032.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	481.032.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	481.032.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	30.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	82.851.120	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	82.851.120	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.851.120	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.851.120	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	772.652.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	772.652.300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	157.457.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	157.457.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	615.195.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	615.195.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	130.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	130.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	130.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	130.000.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PALU	Persentase Penerapan GMP dan SSOP	100 %	800.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PALU	Persentase Penerapan GMP dan SSOP	100 %	800.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Persentase peningkatan Pelaku Usaha/Unit usaha Pengolahan kelautan perikanan yang menerapkan GMP dan SSOP	80 %	800.000.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Persentase peningkatan Pelaku Usaha/Unit usaha Pengolahan kelautan perikanan yang menerapkan GMP dan SSOP	80 %	800.000.000	
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan	400.000.000	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan	400.000.000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	7 Kegiatan	400.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	7 Kegiatan	400.000.000	
4	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I				3.650.482.520	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I				3.650.482.520	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	2.610.482.520	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	2.610.482.520	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%	300.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%	300.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	300.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	300.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	225.691.520	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	225.691.520	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.691.520	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.691.520	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.704.036.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.704.036.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.137.936.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.137.936.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	566.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	566.100.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	350.755.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	350.755.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	12 Unit	350.755.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	12 Unit	350.755.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Donggala	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang	0,82 %	410.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Donggala	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir	0,82 %	410.000.000	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	94234 Ha	410.000.000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	94234 Ha	410.000.000	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	7727 Ha	410.000.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	7727 Ha	410.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Donggala	Target Pendapatan Asli Daerah	1063274 Rp (1000)	630.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Donggala	Target Pendapatan Asli Daerah	1063274 Rp (1000)	630.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	2025844 Kg	630.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	2025844 Kg	630.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	8 Unit	600.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	8 Unit	600.000.000	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	7 Layanan	30.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	7 Layanan	30.000.000	
5	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II				3.304.702.222					3.304.702.222	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	2.114.702.222	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	2.114.702.222	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	209.444.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	209.444.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	209.444.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	209.444.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	590.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	590.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	590.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	590.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	849.099.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	849.099.750	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	511.961.750	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	511.961.750	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	337.138.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	337.138.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	436.158.472	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	436.158.472	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	436.158.472	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	436.158.472	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Parigi Moutong, Kab Tojo Una-Una, Kab Poso	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan	3,36 %	460.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Parigi Moutong, Kab Tojo Una-Una, Kab Poso	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan	3,36 %	460.000.000	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	249966,32 Ha	460.000.000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	249966,32 Ha	460.000.000	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah	121276,46 Ha	460.000.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah	121276,46 Ha	460.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Parigi Moutong	Target Pendapatan Asli Daerah	1172141 Rp (1000)	730.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Parigi Moutong	Target Pendapatan Asli Daerah	1172141 Rp (1000)	730.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan	1929495 Kg	730.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan	1929495 Kg	730.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Unit	700.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Unit	700.000.000	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan	30.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan	30.000.000	
6	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III				3.584.287.950					3.584.287.950	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	2.594.287.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	2.594.287.950	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%	475.530.685	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%	475.530.685	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	475.530.685	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	475.530.685	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	410.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	410.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	410.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	410.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.257.286.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.257.286.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	687.286.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	687.286.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	570.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	570.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	421.470.765	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	421.470.765	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	421.470.765	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	421.470.765	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab. Banggai	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	0,84 %	460.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab. Banggai	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	0,84 %	460.000.000	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	51241,31 Ha	460.000.000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	51241,31 Ha	460.000.000	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	51241,31 Ha	460.000.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	51241,31 Ha	460.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Banggai	Target Pendapatan Asli Daerah	562000 Rp. (1000)	530.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Banggai	Target Pendapatan Asli Daerah	562000 Rp. (1000)	530.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	755700 Kg	530.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	755700 Kg	530.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	8 Unit	500.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	8 Unit	500.000.000	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	7 Layanan	30.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	7 Layanan	30.000.000	
7	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV				2.414.113.723	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV				2.414.113.723	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	1.374.113.723	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	1.374.113.723	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %	227.123.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %	227.123.800	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	227.123.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	227.123.800	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	30.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	184.838.814	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	184.838.814	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	184.838.814	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	184.838.814	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	683.122.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	683.122.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	283.122.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	283.122.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	249.029.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	249.029.109	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	249.029.109	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	249.029.109	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali Utara	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	13,92 %	410.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali Utara	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	13,92 %	410.000.000	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	40783,08 Ha	410.000.000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	40783,08 Ha	410.000.000	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	40783,08 Ha	410.000.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	40783,08 Ha	410.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali Utara	Target Pendapatan Asli Daerah	226720 Rp (1000)	630.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali Utara	Target Pendapatan Asli Daerah	226720 Rp (1000)	630.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1532461,66 Kg	630.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1532461,66 Kg	630.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	600.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	600.000.000	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	30.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	30.000.000	
8	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab ToliToli	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	1.126.434.564	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab ToliToli	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	1.126.434.564	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %	100.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %	100.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	50.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	290.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	290.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	290.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	290.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	379.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	379.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	85.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	85.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	294.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	294.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	306.934.564	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	306.934.564	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	306.934.564	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	306.934.564	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Tolitoli, Kab Buol	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	8 %	549.049.250	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Tolitoli, Kab Buol	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	8 %	549.049.250	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	30000 Ha	549.049.250	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	30000 Ha	549.049.250	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	15,228 Ha	549.049.250	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	15,228 Ha	549.049.250	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab ToliToli	Target Pendapatan Asli Daerah	1099728 Rp (1000)	280.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab ToliToli	Target Pendapatan Asli Daerah	1099728 Rp (1000)	280.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1200000 Kg	280.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1200000 Kg	280.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	250.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	250.000.000	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	30.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	30.000.000	
9	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI				1.150.000.000	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI				1.150.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Banggai laut	indeks kepuasan masyarakat	85 Nilai	670.950.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Banggai laut	indeks kepuasan masyarakat	85 Nilai	670.950.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %	50.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %	50.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	34.548.750	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	34.548.750	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34.548.750	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34.548.750	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	90.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	90.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	366.522.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	366.522.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	272.022.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	272.022.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	94.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	94.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	129.880.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	129.880.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	129.880.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	129.880.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Banggai laut, Kab Banggai kepulauan	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan	0,31 %	249.049.250	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Banggai laut, Kab Banggai kepulauan	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan	0,31 %	249.049.250	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	1148,48 Ha	249.049.250	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	1148,48 Ha	249.049.250	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	114448 Ha	249.049.250	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	114448 Ha	249.049.250	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Banggai Laut	PAD Pelabuhan Wilayah VI (Rp1000)	483687 Rp 1000	230.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Banggai Laut	PAD Pelabuhan Wilayah VI (Rp1000)	483687 Rp 1000	230.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	50000 Kg	230.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	50000 Kg	230.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	200.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	30.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	30.000.000	
10	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII				1.151.000.000	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII				1.151.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali	indeks kepuasan masyarakat	85 Nilai	481.950.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali	indeks kepuasan masyarakat	85 Nilai	481.950.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %	50.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %	50.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	34.548.750	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	34.548.750	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34.548.750	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34.548.750	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	150.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	217.522.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	217.522.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	122.022.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	122.022.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	29.880.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	29.880.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	29.880.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	29.880.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali	Cakupan Wilayah Perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan	11%	439.049.250	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali	Cakupan Wilayah Perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan	11%	439.049.250	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	128,584 Ha	439.049.250	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	128,584 Ha	439.049.250	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	25,716 Ha	439.049.250	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	25,716 Ha	439.049.250	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali	Persentase data update yang tersedia	100 %	230.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali	Persentase data update yang tersedia	100 %	230.000.000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah data sarana prasarana masyarakat yang mendukung kegiatan kepelabuhanan	1 Dokumen	230.000.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah data sarana prasarana masyarakat yang mendukung kegiatan kepelabuhanan	1 Dokumen	230.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	200.000.000	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	30.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	30.000.000	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode / Tahun : 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PALU	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	70 Nilai	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	97 % 75 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214 Orang/ Bulan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	100 Nilai 88 Nilai	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	214 Paket	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	214 Orang	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI Nilai Kualitas	75 Nilai 75 Nilai	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	100 Nilai	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	90 Nilai 100 Nilai	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	12 kab/1 kota	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	19 %	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	72574893 Ha	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	722514 Ha	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	323445 Ha	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	100 Orang	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi	100 %	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	
	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil		Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K	100 %	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang	
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan	3 Kelompok	
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	270 orang	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12 kab/1 kota	Nilai Tukar Nelayan	105 Nilai	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan Tangkap	254212,95 Ton	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	1 Unit	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	280 Unit	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Produksi Perikanan PUD (ton)	3029,56 Ton	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5 Dokumen	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	2 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi	100 %	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	1 Dokumen	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan	65 %	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12 kab/1 kota	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	102,53 Nilai	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi	100 %	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi	100 %	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi budidaya ikan di laut	1224090,92 Ton	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	120 Unit	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi budidaya ikan di darat	92135,88 Ton	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	142 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 kab/1 kota	Persentase pelaku usaha yang diawasi	100 %	
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Persentase pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	100 %	
	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi		Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara	
	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	35 Perkara	
	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1 Orang	
	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	60 Hari Operasi	
	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	1 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	35 Pelaku Usaha	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	400 Pelaku Usaha	
	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	1 Unit	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	60 Kelompok Masyarakat	
	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah		Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase pelaku usaha yang diawasi	100 %	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12 kab/1 kota	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi	234383,76 Ton	
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi	100 %	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	1 Rekomendasi	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Persentase Unit Pengolah Ikan (UPI) yang tersertifikasi	60 %	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0,7 Nilai	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	
	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	8 Unit Usaha	
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir		Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	
2	UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. SIGI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kota Palu	Target Pendapatan Asli Daerah	1625500 Rp (1000)	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi benih Produksi ikan	10 kg 100 Kg	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Produksi benih Produksi ikan	1,5 juta ekor 12500 Kg	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	
3	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PALU	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-	100 %	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PALU	Persentase Penerapan GMP dan SSOP	100 %	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Persentase peningkatan Pelaku Usaha/Unit usaha Pengolahan kelautan perikanan yang menerapkan GMP dan SSOP	80 %	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka	7 Kegiatan	
4	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Donggala	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	0,82 %	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	94234 Ha	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	7727 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Donggala	Target Pendapatan Asli Daerah	1063274 Rp (1000)	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	2025844 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	8 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	7 Layanan	
5	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Parigi Moutong, Kab Tojo Una-Una, Kab Poso	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	3,36 %	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	249966,32 Ha	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	121276,46 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Parigi Moutong	Target Pendapatan Asli Daerah	1172141 Rp (1000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan	1929495 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan	
6	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi APBD	97%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab. Banggai	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	0,84 %	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	51241,31 Ha	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	51241,31 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Banggai	Target Pendapatan Asli Daerah	562000 Rp. (1000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	755700 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	8 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	7 Layanan	
7	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali Utara	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	13,92 %	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	40783,08 Ha	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	40783,08 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali Utara	Target Pendapatan Asli Daerah	226720 Rp (1000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1532461,66 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	5 Layanan	
8	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V				

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab ToliToli	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Tolitoli, Kab Buol	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	8 %	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	30000 Ha	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	15,228 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab ToliToli	Target Pendapatan Asli Daerah	1099728 Rp (1000)	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	1200000 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	
9	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Banggai laut	indeks kepuasan masyarakat	85 Nilai	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Banggai laut, Kab Banggai kepulauan	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	0,31 %	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	1148,48 Ha	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	114448 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Banggai Laut	PAD Pelabuhan Wilayah VI (Rp1000)	483687 Rp 1000	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)	50000 Kg	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	
10	UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab Morowali	indeks kepuasan masyarakat	85 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	97 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kab Morowali	Cakupan Wilayah Perairan dan pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	11%	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	128,584 Ha	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	25,716 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab Morowali	Persentase data update yang tersedia	100 %	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah data sarana prasarana masyarakat yang mendukung kegiatan kepelabuhanan	1 Dokumen	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
 Periode / Tahun : 2026
 Prakiraan Maju : 2027

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									94.539.942.175				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Palu	70 Nilai	38.971.074.354	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		71 Nilai	42.869.281.789
3	25	01	101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		85 Nilai	2.708.481.476	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	2.980.429.623
3	25	01	101	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1.260.000.076	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1.387.100.083
3	25	01	101	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1.248.481.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.373.329.540
3	25	01	101	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Data	110.000.000
3	25	01	101	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	110.000.000
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP		97 % 75 %	26.560.186.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 % 75 %	29.216.205.260
3	25	01	102	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		214 Orang/ Bulan	24.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		214 Orang/ Bulan	26.400.000.000

3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	2.238.130.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.461.943.660
3	25	01	102	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	118.368.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	130.204.800
3	25	01	102	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	131.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	144.342.000
3	25	01	102	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	72.468.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	79.714.800
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	110.000.000
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	110.000.000
3	25	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK		100 Nilai 88 Nilai	551.386.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Nilai 88 Nilai	606.524.600
3	25	01	105	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		214 Paket	263.992.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		214 Paket	290.391.750
3	25	01	105	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	110.000.000
3	25	01	105	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		214 Orang	187.393.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		214 Orang	206.132.850

3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah Nilai Pengukuran implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah Persentase tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor		75 Nilai 75 Nilai 75 Nilai 100 %	2.849.690.071	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Nilai 75 Nilai 75 Nilai 100 %	3.134.659.078
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.860.854.902	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2.046.940.392
3	25	01	106	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	361.332.919	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	397.466.211
3	25	01	106	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	427.502.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	470.252.475
3	25	01	106	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	110.000.000
3	25	01	106	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	110.000.000
3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE		100 Nilai	750.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Nilai	825.000.000
3	25	01	107	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	750.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	825.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		90 Nilai 100 Nilai	2.215.108.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 Nilai 100 Nilai	2.436.618.910
3	25	01	108	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	243.348.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	267.683.130

3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	823.622.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	905.985.080
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1.148.137.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.262.950.700
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	3.236.222.107	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	3.559.844.318
3	25	01	109	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		48 Unit	1.559.879.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Unit	1.715.867.010
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		48 Unit	655.014.420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Unit	720.515.862
3	25	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		5 Unit	1.021.328.587	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	1.123.461.446
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan	12 kab/1 kota	19 %	4.803.619.977	DANA BAGI HASIL (DBH)		19,1 %	3.713.000.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		725,748.93 Ha	2.733.803.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		747,425.45 Ha	1.430.000.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		722,514 Ha	1.433.803.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		744.189 Ha	
3	25	02	101	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		3,234.45 Ha	1.000.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		3,236.45 Ha	1.100.000.000
3	25	02	101	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		100 Orang	300.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		110 Orang	330.000.000
3	25	02	102		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang		100 %	440.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	490.000.000

3	25	02	102	0004		Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan		1 Rekomendasi	250.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Rekomendasi	280.000.000
3	25	02	102	0006		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan		1 Dokumen	190.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	210.000.000
3	25	02	103			Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K		100 %	1.629.816.977	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	1.793.000.000
3	25	02	103	0001		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		300 Orang	529.816.977	DANA BAGI HASIL (DBH)		310 Orang	573.000.000
3	25	02	103	0002		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		3 Kelompok	450.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Kelompok	495.000.000
3	25	02	103	0003		Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		270 orang	150.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		275 orang	175.000.000
3	25	02	103	0004		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		2 Kelompok	400.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		3Kelompok	440.000.000
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan	12 kab/ 1 kota	105 Nilai	32.578.681.780	DANA BAGI HASIL (DBH)		105.10 Nilai	35.517.549.727
3	25	03	101			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap	12 kab/ 1 kota	254.212,95 Ton	22.889.874.021	DANA BAGI HASIL (DBH)		261,839.33 Ton	25.178.861.352
3	25	03	101	0001		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 kab/ 1 kota	12 Dokumen	944.068.615	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Dokumen	1.038.475.400

3	25	03	101	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	12 kab/ 1 kota	1 Unit	178.632.820	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	196.496.102
3	25	03	102	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	12 kab/ 1 kota	280 Unit	21.767.172.586	DANA BAGI HASIL (DBH)		285 Unit	23.943.889.850
3	25	03	102		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produksi Perikanan PUD (ton)	5 kabupaten	3029,56 Ton	461.801.036	DANA BAGI HASIL (DBH)		3120.44 Ton	507.981.139
3	25	03	102	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	5 kabupaten	5 Dokumen	361.801.036	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Dokumen	397.981.139
3	25	03	102	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	5 kabupaten	2 Unit	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	110.000.000
3	25	03	103		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi		100 %	164.166.360	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	180.582.996
3	25	03	103	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia		1 Dokumen	164.166.360	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	180.582.996
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan		65 %	9.062.840.363	DANA BAGI HASIL (DBH)		70%	9.650.124.240
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		2 Unit	9.062.840.363	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	9.650.124.240
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	12 kab/ 1 kota	102,53 Nilai	7.422.648.706	DANA BAGI HASIL (DBH)		102,65 Nilai	8.164.913.576

3	25	04	101		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi		100 %	40.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	44.000.000
3	25	04	101	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		1 Rekomendasi	40.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Rekomendasi	44.000.000
3	25	04	102		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi		100 %	40.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	44.000.000
3	25	04	102	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		1 Rekomendasi	40.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Rekomendasi	44.000.000
3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut		1,224,090.92 Ton	4.442.648.706	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,260,813.64 Ton	4.886.913.576
3	25	04	105	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	120.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	132.000.000
3	25	04	105	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		5 Unit	450.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Unit	495.000.000
3	25	04	105	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		120 Unit	3.492.648.706	DANA BAGI HASIL (DBH)		125 Unit	3.841.913.576
3	25	04	105	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia		1 Unit	380.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	418.000.000
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi budidaya ikan di darat		92,135.88 Ton	2.900.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		94,899.95 Ton	3.190.000.000
3	25	04	106	0003	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		142 Unit	2.000.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		150 Unit	2.200.000.000

3	25	04	106	0004	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10 Unit	900.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		11 Unit	990.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelaku usaha yang diawasi		100 %	8.057.259.972	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	8.739.985.970
3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi		100 %	7.922.259.972	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	8.591.485.970
3	25	05	101	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani		2 Perkara	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Perkara	55.000.000
3	25	05	101	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani		35 Perkara	594.143.530	DANA BAGI HASIL (DBH)		36 Perkara	653.557.883
3	25	05	101	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk		1 Orang	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Orang	55.000.000
3	25	05	101	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		60 Hari Operasi	150.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		65 Hari Operasi	175.000.000
3	25	05	101	0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan		1 Unit	2.500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	2.600.000.000
3	25	05	101	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		35 Pelaku Usaha	500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		36 Pelaku Usaha	550.000.000

3	25	05	101	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		400 Pelaku Usaha	1.500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		410 Pelaku Usaha	1.650.000.000
3	25	05	101	0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun		1 Unit	350.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	400.000.000
3	25	05	101	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		30 Pelaku Usaha	1.298.116.442	DANA BAGI HASIL (DBH)		32 Pelaku Usaha	1.427.928.087
3	25	05	101	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		60 Kelompok Masyarakat	900.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		62 Kelompok Masyarakat	990.000.000
3	25	05	101	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan		1 Forum	30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Forum	35.000.000
3	25	05	102		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha yang diawasi		100 %	135.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	148.500.000
3	25	05	102	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		6 Pelaku Usaha	135.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Pelaku Usaha	148.500.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi		234.383,76 Ton	2.706.657.386	DANA BAGI HASIL (DBH)		241,415.24 Ton	2.977.323.123
3	25	06	101		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi		100 %	179.001.387	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	196.901.525

3	25	06	101	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan	1 Dokumen	109.001.387	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	119.901.525
3	25	06	101	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah	1 Rekomendasi	70.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Rekomendasi	77.000.000
3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Unit Pengolah Ikan (UPI) yang tersertifikasi	60 %	638.399.169	DANA BAGI HASIL (DBH)	65%	702.239.085
3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	638.399.169	DANA BAGI HASIL (DBH)	4 Kegiatan	702.239.085
3	25	06	103		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	0,7 Nilai	1.889.256.830	DANA BAGI HASIL (DBH)	0,71 Nilai	2.078.182.513
3	25	06	103	0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	145.216.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	159.737.600
3	25	06	103	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	8 Unit Usaha	1.544.040.830	DANA BAGI HASIL (DBH)	9 Unit Usaha	1.698.444.913
3	25	06	103	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	200.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Sistem Informasi	220.000.000
					UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN			5.969.191.380			6.593.000.000

3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Mayarakat		85 Nilai	4.119.191.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	4.553.000.000
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97 %	1.754.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	2.000.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1.754.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.000.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	33.000.000
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	33.000.000
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	270.144.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	300.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	270.144.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	300.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1.864.586.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	2.000.000.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	787.286.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	850.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1.077.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.150.000.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	220.000.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		17 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Unit	220.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Target Pendapatan Asli Daerah	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kota Palu	1625500 Rp (1000)	1.850.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,674,265 Rp (1000)	2.040.000.000
3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi benih Produksi ikan		10 kg 100 Kg	100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		11 kg 110 Kg	110.000.000

3	25	04	105	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		1 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	55.000.000
3	25	04	105	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		1 Unit	50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	55.000.000
3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih Produksi ikan		1,5 juta ekor 12500 Kg	1.750.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,6 juta ekor 13500 Kg	1.930.000.000
3	25	04	106	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5 Unit	450.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Unit	500.000.000
3	25	04	106	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		8 Unit	1.300.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		8 Unit	1.430.000.000
					UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				2.296.535.420				2.573.000.000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		85 Nilai	1.496.535.420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	1.673.000.000
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97 %	481.032.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	550.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	481.032.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	550.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	33.000.000
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	33.000.000
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	82.851.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	90.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	82.851.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	90.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	772.652.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	850.000.000

3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	157.457.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	170.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	615.195.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	680.000.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	150.000.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	150.000.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Penerapan GMP dan SSOP		100 %	800.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	900.000.000
3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase peningkatan Pelaku Usaha/Unit usaha Pengolahan kelautan perikanan yang menerapkan GMP dan SSOP		80 %	800.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		80 %	900.000.000
3	25	06	102	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		7 Kegiatan	400.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		8 Kegiatan	450.000.000
3	25	06	102	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan		7 Kegiatan	400.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		8 Kegiatan	450.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I				3.650.482.520				4.083.000.000

3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Mayarakat		85 Nilai	2.610.482.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	2.933.000.000
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97%	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	330.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	330.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	33.000.000
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	33.000.000
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	225.691.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	250.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	225.691.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	250.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1.704.036.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.930.000.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1.137.936.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.300.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	566.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	630.000.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	350.755.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	390.000.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	350.755.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	390.000.000

3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan		0,82 %	410.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		0,85 %	450.000.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		942.34 Ha	410.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		942.34 Ha	450.000.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		7.727 Ha	410.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		7.958 Ha	450.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah		1,063,274 Rp (1000)	630.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,095,172 Rp (1000)	700.000.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan		2,025,844 Kg	630.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2,086,619 Kg	700.000.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		8 Unit	600.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		8 Unit	660.000.000
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		7 Layanan	30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		7 Layanan	40.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II				3.304.702.222				3.649.000.000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		85 Nilai	2.114.702.222	PENDAPATAN ASLI DAERAH		86 Nilai	2.333.000.000
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97 %	209.444.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		97 %	230.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		1 Dokumen	209.444.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	230.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	33.000.000
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik		1 Laporan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Laporan	33.000.000
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	590.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	650.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		1 Paket	590.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Paket	650.000.000

3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	849.099.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	940.000.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	511.961.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	570.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	337.138.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	370.000.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	436.158.472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	480.000.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	436.158.472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit	480.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan	3,36 %	460.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	3,40 %	506.000.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola	249.966,32 Ha	460.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	250,465.30 Ha	506.000.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	121.276,46 Ha	460.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	121,914.75 Ha	506.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah	1,1721,41 Rp (1000)	730.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1,207,305 Rp (1000)	810.000.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan	1,929,495 Kg	730.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1,987,379 Kg	810.000.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7 Unit	700.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	7 Unit	770.000.000
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	9 Layanan	30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)	9 Layanan	40.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III			3.584.287.950			3.976.000.000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	2.594.287.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86 Nilai	2.880.000.000

3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97%	475.530.685	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	525.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	475.530.685	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	525.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	33.000.000
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	33.000.000
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	410.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	460.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	410.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	460.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1.257.286.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.397.000.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	687.286.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	770.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	570.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	627.000.000

3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	421.470.765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	465.000.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	421.470.765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	465.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan		0,84 %	460.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		0,85 %	506.000.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		51.241,31 Ha	460.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		51.241,31 Ha	506.000.000
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		51.241,31 Ha	460.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		51.241,31 Ha	506.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah		562,000 Rp. (1000)	530.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		578,860 Rp. (1000)	590.000.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan		755,700 Kg	530.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		778,371 Kg	590.000.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit	500.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	550.000.000
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		7 Layanan	30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		7 Layanan	40.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV				2.414.113.723				2.666.000.000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		85 Nilai	1.374.113.723	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	1.515.000.000
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD		97 %	227.123.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	250.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	227.123.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	250.000.000

3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	33.000.000
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	33.000.000
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	184.838.814	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	205.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	184.838.814	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	205.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	683.122.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	752.000.000
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	440.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	283.122.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	312.000.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	249.029.109	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	275.000.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		23 Unit	249.029.109	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Unit	275.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan		13,92 %	410.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		13,92 %	451.000.000
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		40783,08 Ha	410.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		40783,08 Ha	451.000.000

3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		40783,08 Ha	410.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		40783,08 Ha	451.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah		226,720 Rp (1000)	630.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		233,521 Rp (1000)	700.000.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan		1532461,66 Kg	630.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,578,434 Kg	700.000.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		4 Unit	600.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Unit	660.000.000
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		5 Layanan	30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Layanan	40.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V				1.955.483.814				2.999.532.195
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		85 Nilai	1.126.434.564	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	2.080.578.020
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD		97 %	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	110.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	110.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	55.000.000
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	55.000.000
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	290.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	319.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	290.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	319.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	379.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	1.258.950.000

3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	85.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	935.000.000
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	294.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	323.950.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	306.934.564	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	337.628.020
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	306.934.564	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	337.628.021
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan		8 %	549.049.250	DANA BAGI HASIL (DBH)		8,20%	603.954.175
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		30000 Ha	549.049.250	DANA BAGI HASIL (DBH)		30,900 Ha	603.954.175
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		15,228 Ha	549.049.250	DANA BAGI HASIL (DBH)		15,684 Ha	603.954.175
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah		1,099,728 Rp (1000)	280.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,132,719 Rp (1000)	315.000.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan		1200000 Kg	280.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,236,000 Kg	315.000.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit	250.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	275.000.000
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		3 Layanan	30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Layanan	40.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI				1.150.000.000				1.272.000.000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan masyarakat		85 Nilai	670.950.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	738.045.825

3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT		97 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	55.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	38.003.625
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	38.003.625
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	99.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	99.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	366.522.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	403.174.200
3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	272.022.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	299.224.200
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	94.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	103.950.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	129.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	142.868.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	129.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	142.868.001
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan		0,31 %	249.049.250	DANA BAGI HASIL (DBH)		0,35 %	273.954.175
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		1148,48 Ha	249.049.250	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,183Ha	273.954.175

3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		114448 Ha	249.049.250	DANA BAGI HASIL (DBH)		1,183Ha	273.954.175
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD Pelabuhan Wilayah VI (Rp1000)		483,687 Rp 1000	230.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		498,197 Rp 1000	260.000.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)		50000 Kg	230.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		60000 Kg	260.000.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit	200.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	220.000.000
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		5 Layanan	30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Layanan	40.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII				1.151.000.000				1.273.100.000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan masyarakat		85 Nilai	481.950.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Nilai	530.145.825
3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT		97 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97 %	55.000.000
3	25	01	102	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55.000.000
3	25	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	38.003.625
3	25	01	103	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	34.548.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	38.003.625
3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	165.000.000
3	25	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	165.000.000
3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	217.522.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	239.274.200

3	25	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	122.022.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	134.224.200
3	25	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	95.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	105.050.000
3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	29.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	32.868.000
3	25	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	29.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	32.868.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan pesisir yang terkelola secara berkelanjutan		11%	439.049.250	DANA BAGI HASIL (DBH)		11,5%	482.954.175
3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		128,584 Ha	439.049.250	DANA BAGI HASIL (DBH)		132,441 Ha	482.954.175
3	25	02	101	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		25,716 Ha	439.049.250	DANA BAGI HASIL (DBH)		26,487 Ha	482.954.175
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase data update yang tersedia		100 %	230.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		100 %	260.000.000
3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah data sarana prasarana masyarakat yang mendukung kegiatan kepelabuhanan		1 Dokumen	230.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	260.000.000
3	25	03	106	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit	200.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	220.000.000
3	25	03	106	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		1 Layanan	30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Layanan	40.000.000
JUMLAH									120.015.739.204				131.066.686.380

**Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
1			2				3	4		8	9	17	10
	Memajukan dan mensejahterahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan berbasis pengelolaan SDKP yang berkeadilan dan berkelanjutan							PDRB Perikanan		6			
								Penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan (%)		8			
1		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		70 Nilai	38.971.074.354	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	3	25	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		85 Nilai	2.708.481.476		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1.260.000.076		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1.248.481.400		
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3	25	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
								Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	100.000.000		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3	25	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	100.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah Persentase Hasil Tindakanlanjutan Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP		97 % 75 %	26.560.186.600		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		214 Orang/ Bulan	24.000.000.000		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	2.238.130.600		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	118.368.000		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	131.220.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			1 Laporan	72.468.000		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan			100 %	100.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	100.000.000		
		Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK			100 Nilai 88 Nilai	551.386.000		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			214 Paket	263.992.500		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	25	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	100.000.000		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	25	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			214 Orang	187.393.500		
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah Nilai Pengukuran implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah Persentase tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor			75 Nilai 75 Nilai 75 Nilai 100 %	2.849.690.071		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.860.854.902		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	361.332.919		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	427.502.250		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	25	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	100.000.000		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	25	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	100.000.000		
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE			100 Nilai	750.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	750.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			90 Nilai 100 Nilai	2.215.108.100		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	243.348.300		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	823.622.800		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1.148.137.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara			100 %	3.236.222.107		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			48 Unit	1.559.879.100		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			48 Unit	655.014.420		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			5 Unit	1.021.328.587		
		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil							Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan			0,1884			
2		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan			19 %	4.803.619.977		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola			725748.93 Ha	2.733.803.000		
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			722514 Ha	1.433.803.000		
		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi			3234.45 Ha	1.000.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			100 Orang	300.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Arahan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi			100 %	440.000.000		
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	3	25	02	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan			1 Rekomendasi	250.000.000		
		Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi	3	25	02	1.02	0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan			1 Dokumen	190.000.000		
		Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dan PPK	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K			100 %	1.629.816.977		
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			300 Orang	529.816.977		
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			3 Kelompok	450.000.000		
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			270 orang	150.000.000		
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			2 Kelompok	400.000.000		
		Tersedianya sarana usaha perikanan	3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan yang tersedia			1 Unit	100.000.000		
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan							Nilai Tukar Perikanan			103,93			
		Meningkatnya angka konsumsi ikan							Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)			73,4			
3		Meningkatnya nilai tukar bidang perikanan tangkap	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan			105 Nilai	32.578.681.780		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap			254.212,95 Ton	22.889.874.021		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		12 Dokumen	944.068.615		
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1 Unit	178.632.820		
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		280 Unit	21.767.172.586		
		Meningkatnya produksi perikanan PUD	3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Produksi Perikanan PUD		3029,56 Ton	461.801.036		
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		5 Dokumen	361.801.036		
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		2 Unit	100.000.000		
		Meningkatnya unit usaha perikanan tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi perizinannya	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi		100 %	164.166.360		
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan beroperasi sampai dengan 12 mil		Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia		1 Dokumen	164.166.360		
		Terwujudnya pengembangan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi yang ditetapkan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan		65 %	9.062.840.363		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		2 Unit	9.062.840.363		
4		Meningkatnya nilai tukar bidang perikanan budidaya	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan		102,53 Nilai	7.422.648.706		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terfasilitasinya Rekomendasi perizinan Berusaha Bidang pembudidayaan Ikan	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi		100 %	40.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Diterbitkannya Rekomendasi perizinan Berusaha Bidang pembudidayaan Ikan	3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha	Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			1 Rekomendasi	40.000.000		
									Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan						
		Terfasilitasinya Rekomendasi perizinan Berusaha Bidang pembudidayaan Ikan	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang difasilitasi			100 %	40.000.000		
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha	Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			1 Rekomendasi	40.000.000		
									Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan						
		Meningkatnya Produksi budidaya ikan di laut	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut			1.224.090,92 Ton	4.442.648.706		
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	120.000.000		
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			5 Unit	450.000.000		
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			120 Unit	3.492.648.706		
		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia			1 Unit	380.000.000		
		Meningkatnya Produksi budidaya ikan di darat	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi budidaya ikan di darat			92.135,88 Ton	2.900.000.000		
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			142 Unit	2.000.000.000		
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			10 Unit	900.000.000		
		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP							Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan			87,98%			
5		Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pelaku usaha yang diawasi			100 %	8.057.259.972		
		Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi			100 %	7.922.259.972		
		Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	3	25	05	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani			2 Perkara	50.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani			35 Perkara	594.143.530		
		Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk			1 Orang	50.000.000		
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			60 Hari Operasi	150.000.000		
		Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	3	25	05	1.01	0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan			1 Unit	2.500.000.000		
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			35 Pelaku Usaha	500.000.000		
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			400 Pelaku Usaha	1.500.000.000		
		Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	3	25	05	1.01	0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun			1 Unit	350.000.000		
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			30 Pelaku Usaha	1.298.116.442		
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan			60 Kelompok Masyarakat	900.000.000		
		Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan			1 Forum	30.000.000		
		Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha diwilayah PUD	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha yang diawasi			100 %	135.000.000		
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			6 Pelaku Usaha	135.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
6		Meningkatnya serapan produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi		234.383,76 Ton	2.706.657.386		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terfasilitasinya izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	3	25	06	1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi		100 %	179.001.387		
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	3	25	06	1.01	0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko		1 Dokumen	109.001.387		
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	3	25	06	1.01	0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar		1 Rekomendasi	70.000.000		
		Meningkatnya Unit Pengolah Ikan (UPI) yang tersertifikasi	3	25	06	1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Unit Pengolah Ikan (UPI) yang tersertifikasi		60 %	638.399.169		
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3	25	06	1.02	0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		3 Kegiatan	638.399.169		
		Meningkatnya mutu produk perikanan binaan	3	25	06	1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio produk perikanan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan		0,7 Nilai	1.889.256.830		
		Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	25	06	1.03	0001 Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 Dokumen	145.216.000		
		Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	25	06	1.03	0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi		8 Unit Usaha	1.544.040.830		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	3	25	06	1.03	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir			1 Sistem Informasi	200.000.000		
								UPTD. Balai Perbenihan Perikanan					5.969.191.380		
7		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat			85 Nilai	4.119.191.380	UPTD. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD			97 %	1.754.460.000		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1.754.460.000		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan			100 %	30.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	30.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100 %	270.144.880		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	270.144.880		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	1.864.586.500		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			1 Laporan	787.286.500		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1.077.300.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara			100 %	200.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			17 Unit	200.000.000		
8		Meningkatnya Nilai PAD yang dihasilkan Balai perbenihan	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Target Pendapatan Asli Daerah			1625500 Rp. (1000)	1.850.000.000	UPTD. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN	
			3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi benih Produksi ikan			10 Kg 100 Kg	100.000.000		
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			1 Unit	50.000.000		
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			1 Unit	50.000.000		
		Meningkatnya produksi perikanan air payau dan tawar	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih Produksi ikan			1,5 juta ekor 12500 Kg	1.750.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			5 Unit	450.000.000		
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			8 Unit	1.300.000.000		
								UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan					2.296.535.420		
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					2.296.535.420		
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					2.296.535.420		
9		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat			85 Nilai	1.496.535.420	UPTD. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD			97 %	481.032.000		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	481.032.000		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100 %	30.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	30.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100 %	82.851.120		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	82.851.120		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	772.652.300		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	157.457.300		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	615.195.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara			100 %	130.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	130.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
10		Meningkatnya Jumlah Inspeksi dan Pembinaan Teknis Terhadap unit Usaha dalam menerapkan standar mutu serta keamanan pangan	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Penerapan GMP dan SSOP		100 %	800.000.000	UPTD. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		Meningkatkan Jumlah Inspeksi dan Pembinaan Teknis Terhadap unit Usaha dalam menerapkan standar mutu serta keamanan pangan	3	25	06	1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase peningkatan Pelaku Usaha/Unit usaha Pengolahan kelautan perikanan yang menerapkan GMP dan SSOP		80 %	800.000.000		
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing					
		dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		7 Kegiatan	400.000.000	UPTD. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					
								Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		7 Kegiatan	400.000.000	UPTD. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
											3.650.482.520		
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.650.482.520		
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			3.650.482.520		
11		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		85 Nilai	2.610.482.520	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97%	300.000.000		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	300.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	30.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	225.691.520		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	225.691.520		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1.704.036.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1.137.936.000		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	566.100.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan			100 %	350.755.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	350.755.000		
12		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan			0,82 %	410.000.000		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola			942.34 Ha	410.000.000		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			7.727 Ha	410.000.000		
13		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah			1,063,274 Rp (1000)	630.000.000		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan			2,025,844 Kg	630.000.000		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia			8 Unit	600.000.000		
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			7 Layanan	30.000.000		
								UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II					3.304.702.222		
14		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat			85 Nilai	2.114.702.222	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH II	Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD			97 %	209.444.000		Kab. Poso, Semua Kec, Semua Kel/Desa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	209.444.000		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan			100 %	30.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	30.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100 %	590.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	590.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	849.099.750		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	511.961.750		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	337.138.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara			100 %	436.158.472		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	436.158.472		
15		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan			3,36 %	460.000.000		Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola			249.966,32 Ha	460.000.000		Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			121.276,46 Ha	460.000.000		
16		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah			1172141 Rp. (1000)	730.000.000		Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan			1929495 Kg	730.000.000		Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia			7 Unit	700.000.000		
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			9 Layanan	30.000.000,00		

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
							UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III				3.584.287.950		
17		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		85 Nilai	2.594.287.950	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi APBD		97 %	475.530.685		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Tugas ASN					
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	475.530.685		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan		100 %	30.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing		100 %	410.000.000		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	410.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1.257.286.500		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik					
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	687.286.500		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	570.000.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	421.470.765		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		34 Unit	421.470.765		
18		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan		0,84 %	460.000.000		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3	25	02	1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		51241,31 Ha	460.000.000		
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						
								Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		51241,31 Ha	460.000.000		
19		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah		562000 Rp. (1000)	530.000.000		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meninkatnya produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	3	25	03	1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah		755700 Kg	530.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1 Unit	500.000.000		Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia							
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				7 Layanan	30.000.000		
								Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana							
								UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV				2.414.113.723			
20		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat			85 Nilai	1.374.113.723	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD			97 %	227.123.800		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	227.123.800		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan			100 %	30.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100 %	184.838.814		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	184.838.814		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	683.122.000		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	400.000.000		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	283.122.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara			100 %	249.029.109		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	249.029.109		
21		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan			13,98 %	410.000.000	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola			40783,08 Ha	410.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			40783,08 Ha	410.000.000	PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV	
22		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah			226720 Rp. (1000)	630.000.000	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH IV	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatkan produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan			1532461,66 Kg	630.000.000		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia			4 Unit	600.000.000		
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			5 Layanan	30.000.000		
								UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V				1.955.483.814			
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.955.483.814		
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					1.955.483.814		
23		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat			85 Nilai	1.126.434.564	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V	Kab. Toli Toli, Dampal Utara, Ogotua
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD			97 %	100.000.000		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	100.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan			100 %	50.000.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	50.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100 %	290.000.000		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	290.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	379.500.000		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	85.000.000		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	294.500.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara			100 %	306.934.564		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	306.934.564		
24		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan			8 %	549.049.250	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU	Kab. Toli Toli, Dampal Utara, Ogotua
		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola			30000 Ha	549.049.250		
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			15,228 Ha	549.049.250		
25		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Target Pendapatan Asli Daerah			1099728 Rp. (1000)	280.000.000	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH V	Kab. Toli Toli, Dampal Utara, Ogotua
		Meningkatnya produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan			1200000 Kg	280.000.000		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia			1 Unit	250.000.000		
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			3 Layanan	30.000.000		
								UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI					1.150.000.000		
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.150.000.000		
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					1.150.000.000		
26		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan masyarakat			85 Nilai	670.950.750	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU	Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT			97 %	50.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	50.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan			100 %	34.548.750		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	34.548.750		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	90.000.000		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	90.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %	366.522.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Target	Rp		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	272.022.000		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	94.500.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara			100 %	129.880.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	129.880.000		
27		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang dikelola secara berkelanjutan			0,31 %	249.049.250	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI	Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola			1148,48 Ha	249.049.250		
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			1144,48 Ha	249.049.250		
28		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD Pelabuhan Wilayah VI (Rp.1.000)			483.687 Rp. 1000	230.000.000	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VI	Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		Meningkatnya produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah VI (Kg)			50.000 Kg	230.000.000		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia			1 Unit	200.000.000		
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			5 Layanan	30.000.000		
								UPTD. Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII					1.151.000.000		
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.151.000.000		
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					1.151.000.000		
29		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan masyarakat			85 Nilai	481.950.750	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN	Kab. Morowali, Bungku Pesisir, Lafeu
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT			97 %	50.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan UPT	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	50.000.000		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan			100 %	34.548.750		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	34.548.750		

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	3	25	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	150.000.000		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	150.000.000		
		Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	25	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	217.522.000		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	122.022.000		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	25	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	95.500.000		
		Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	3	25	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100 %	29.880.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	25	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	29.880.000		
30		Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Wilayah Perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan		11%	439.049.250	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII	Kab. Morowali, Bungku Pesisir, Lafeu
		Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3	25	02	1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola		128,584 Ha	439.049.250		
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	3	25	02	1.01	0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		252.127,04 Ha	439.049.250		
31		Meningkatnya Nilai PAD	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase data update yang tersedia		100 %	230.000.000		Kab. Morowali, Bungku Pesisir, Lafeu
		Meningkatnya produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan	3	25	03	1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah data sarana prasarana masyarakat yang mendukung kegiatan kepelabuhanan		1 Dokumen	230.000.000	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH VII	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit	200.000.000		
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		1 Layanan	30.000.000		
		J U M L A H									120.015.739.204		